



**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**

RENSTRA PERUBAHAN

2016-2021

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Alamat. Jln. Basuki Rahmat No. 11 Praya
Telp. (0370)654393 Kode Pos 83511



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen ini disusun dari hasil pengumpulan dan kompilasi data serta study literatur, dalam upaya memenuhi kewajiban instansi pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 dan diharapkan dapat memberikan kontribusi, bagi semua pihak guna terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Selanjutnya untuk penyempurnaan Rencana Strategik perlu dilakukan Review sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2008, yang ditindak lanjuti dengan PERBUP Nomor: 29 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, saran dan kritik dari para pembaca sangat diharapkan, kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penyusunan dokumen ini disampaikan ucapan terima kasih.

Praya,

2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lombok Tengah



Ir. Mohamad Amir Ali
NIP.196504291992031005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
EXECUTIVE SUMMARY	v
PENDAHULUAN	6
1. Latar Belakang	6
2. Pengertian.....	8
3. Tujuan	8
4. Metode Penulisan.	9
5. Sistematika.	9
GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD	11
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11
1. Tugas Pokok dan Fungsi.	11
2. Struktur Organisasi	17
3. Sumber Daya Manusia	17
4. Kondisi Pelayanan SKPD	21
5. Tantangan Pelayanan SKPD	31
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	34
1. Penentuan Isu-Isu Strategis	34
2. Asumsi Dan Faktor Penentu Keberhasilan (FPK)	37
3. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan	39
3. Telaahan Visi, Misi, Tujuan Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ..	41
4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Klhs).....	50
VISI, MISI TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	51
1. Visi Dan Misi SKPD	51
2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	52
3. Strategi Dan Kebijakan	73
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DAN SPM	80
PENUTUP	88



EXECUTIVE SUMMARY

Dokumen Rencana strategik di susun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2008 yang antara lain didalamnya memuat berbagai program yang disusun secara realistis sesuai kebutuhan dan sebagai pedoman pelaksanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada kurun waktu 2016 – 2020. Masalah pokok yang dibahas adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di bidang Pekerjaan Umum untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka mewujudkan Good Governance dan Otonomi Daerah.

Dengan pembahasan ini diharapkan dapat ditemukan essensi masalah atau masalah strategik untuk diprioritaskan pemecahannya sehingga pelayanan prasarana dasar dapat ditingkatkan kualitasnya. Data dan informasi dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode observasi yaitu menggali pengalaman langsung para karyawan dan berbagai dokumen tertulis.

Metode analisis data menggunakan metode analisis manajemen strategik yaitu mencermati aspek-aspek yang mempengaruhi kondisi lingkungan strategik, kemudian ditemukan asumsi-asumsi serta faktor-faktor penentu keberhasilan, sehingga dapat disusun rencana strategik yang logis dan sistemik. Analisis atau kajian atas data/fakta berlandaskan pada pendekatan kajian perubahan paradigma, membangun organisasi pembelajaran, kebijakan publik, pemberdayaan rakyat, perwujudan good governance dan otonomi daerah, serta teori – teori lain yang relevan.

Dari analisis data ditemukan beberapa essensi masalah atau masalah strategik, selanjutnya disusun upaya pemecahan yaitu dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan operasional, program dan kegiatan, apabila telah mendapatkan persetujuan Eksekutif dan Legislatif, harus dijadikan acuan dan pedoman semua aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu 2016 – 2021 dalam melaksanakan program kerjanya. Atas analisis dan temuan essensi masalah atau masalah strategik dan perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 dapat disimpulkan bahwa diperlukan kerja keras dan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah agar dapat memenuhi harapan yang diinginkan. Akhirnya dikomunikasikan dengan berbagai pihak yang berkompeten agar mendapat dukungan untuk dicantumkan dalam APBD.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Proses pembangunan prasarana pada akhir-akhir ini dihadapkan pada situasi yang penuh dilema, disatu sisi adanya keterbatasan dana akibat krisis multi dimensi yang tak kunjung berakhir, disisi lain adanya tuntutan masyarakat tentang tersedianya prasarana yang mantap semakin tinggi. Perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang semakin kompleks dan dinamis, serta ketidak pastian yang semakin besar dalam tatanan kehidupan masyarakat banyak dikaitkan dengan isu kecendrungan global.

Pemerintah diusahakan lebih berperan sebagai pendorong proses perubahan/ pembangunan, sebagai agent of change, masyarakat dan terutama sektor swasta yang berperan dalam governance, sebagai masyarakat bangsa.

Good Governance sebagai salah satu fokus reformasi, merupakan salah satu isu strategik yang mendorong dan diharapkan mewarnai dinamika pembangunan prasarana dalam lingkup tugas dan misi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sekaligus diarahkan untuk : *"Meningkatkan Kompetensi Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Untuk Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategik Baik Internal Maupun Eksternal Dalam Pembangunan Prasarana Untuk Menunjang Otonomi Daerah"* Birokrasi ramping dan aparatur yang profesional yang memberdayakan masyarakat, fasilitating, enabling, empowering. Hal-hal yang sudah bisa dilakukan lebih baik oleh dunia usaha swasta dan organisasi masyarakat dalam pengelolaan prasarana sangat strategik untuk dikembangkan dan diserahkan kepada mereka, karena paradigma kedepan akan menekankan pemerintah lebih berfungsi sebagai pengarah (steering) dari pada fungsi sebagai pelaksanaan (rowing).

Dalam Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi



Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD.

Perubahan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2011-2031. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021, harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Visi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031, yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA, DAN MAJU BERDAYA SAING," merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang 2016-2021 disusun sesuai dengan undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Lembaga Negara termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang berisi perencanaan satuan kerja/dinas selama lima tahun yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Renstra memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lombok Tengah 2016 – 2021. Sebagai bentuk implikasi dari penerapan susunan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah maka dinas Pekerjaan umum dipisah menjadi dua Dinas yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dengan perubahan organisasi perangkat daerah ini maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kembali menyusun Rencana Strategis yang sesuai dengan mandat dan kewenangannya yakni melaksanakan sebagian tugas di bidang Pekerjaan Umum dan



Penataan Ruang. Penyusunan Renstra 2016 - 2021 ini, di samping berdasarkan pada tugas dan kewenangan SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan dan isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kabupaten Lombok Tengah. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

2. Pengertian

Rencana Strategik (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016 - 2021 adalah merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Rencana Strategik Kabupaten Lombok Tengah. Didalam Rencana Strategik ini memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Rencana Strategik ini adalah merupakan dokumen perencanaan yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor: 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah, sehingga harus dijadikan acuan oleh setiap unsur Perangkat Daerah Kabupaten dalam memenuhi Instruksi Presiden Nomor: 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

3. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah memberikan arah yang lebih jelas terhadap tujuan pembangunan yang ingin dicapai dengan mengantisipasi perubahan-perubahan dan perkembangan yang



terjadi dimasyarakat melalui kerja sama dari semua pihak serta memudahkan penyusunan perencanaan tahunan.

4. Metode Penulisan.

1. Metode Pengumpulan Data:

Metode pengumpulan data yang meliputi :

- a. Data primer dikumpulkan melalui kegiatan dialog, diskusi dan observasi yaitu menggali pengalaman langsung aparatur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Data sekunder dilakukan dengan mempelajari berbagai dokumen tertulis.
- c. Studi literatur.
- d. Data Statistik

2. Metode Analisis Data:

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis manajemen strategik, dengan berlandaskan pada pendekatan kajian paradigma, membangun organisasi pembelajaran, kebijakan publik, pemberdayaan rakyat, good governance dan otonomi daerah, serta teori – teori lain yang relevan, dan aspek bahasan dalam dialog, diskusi dan rapat-rapat intern meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan serta sarana dan prasarana.

5. Sistematika.

Untuk mempermudah pemahaman dari materi bahasan, dokumen Renstra ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang pemikiran, pengertian rencana strategik, tujuan Penyusunan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Deskripsi lingkungan strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menguraikan tentang gambaran umum Kabupaten Lombok Tengah, sebagai arahan dan pedoman yang melingkari ruang gerak konsepsi perencanaan, implementasi otonomi daerah yang dituangkan dalam restrukturisasi organisasi berupa struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tugas pokok dan fungsi, aset-aset yang dikuasai serta kondisi saat ini, sumber daya manusia yang diharapkan untuk melaksanakan semua kegiatan yang disepakati, beberapa uraian menyangkut pengertian dari istilah yang sering digunakan dalam



lingkup permukiman dan prasarana wilayah yang diharapkan dapat memberikan persepsi dan interpretasi yang sama bagi para pembaca, serta upaya dan permasalahan yang dihadapi.

BAB III : Rencana Strategik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menguraikan tentang visi, misi, nilai-nilai yang dianut, moto yang diharapkan sebagai pendorong motivasi dan komitmen. Analisis lingkungan strategik internal dan eksternal, asumsi-asumsi yang diharapkan sebagai dalil atau aksioma pembenar dalam merumuskan tujuan, sasaran, program-program yang direncanakan, kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan. Hal tersebut dilakukan melalui proses analisis manajemen strategik, untuk mencari faktor faktor yang akan mempengaruhi pelaksanaan rencana.

BAB IV : Kesimpulan dan saran yang ditujukan pada para pembaca, khususnya para penentu kebijaksanaan di eksekutif dan legislatif sebagai salah satu masukan dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur terutama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk menunjang otonomi daerah menuju terwujudnya good governance.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terbentuk pada awal dimulainya Otonomi Daerah dengan Perda no. 11 tahun 2000, dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 7 Tahun 1999 dan di review kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok:

Tugas Pokok Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah adalah melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum.

Adapun Fungsi Dinas sebagai berikut :

- a. Penyusunan Rencana dan program serta melaksanakan kebijaksanaan dalam Membantu Bupati dibidang pekerjaan umum;
- b. Pengelolaan Tata Usaha Dinas yang meliputi administrasi umum, keuangan, perlengkapan dan kepegawaian;
- c. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pelaksanaan Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan hubungan kedalam maupun keluar;
- f. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis (UPT);
- g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Secara rinci dapat dijelaskan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:



1. Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Perencanaan Program.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran rutin, pelaporan, serta pembinaan organisasi dan perlengkapan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, penyusunan Peraturan Daerah, dokumentasi dan kepustakaan;
- c. Penyusunan rencana program pembangunan dibidang pekerjaan umum;
- d. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dibidang pekerjaan umum;
- e. Penyelenggaraan jasa konstruksi;
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretariat Dinas terdiridari:

- a. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bidang Keuangan;
- c. Sub Bidang Perencanaan;

2. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang Bina Marga.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan perencanaan teknis;
- b. Pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Bina Marga;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang kebinamargaan;
- d. Pendataan dan penyusunan serta penyampaian laporan dibidang kebinamargaan;
- e. Penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana jalan dan jembatan serta pengembangannya;



- f. Pengaturan status jalan dan jembatan Kabupaten dan Desa;
- g. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten dan Desa;
- h. Pendataan dan penginventarisiran aset-aset jalan dan jembatan;
- i. Pemantauan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan C. disekitar lokasi jalan dan jembatan;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis Kebinamargaan;
- b. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

3. Bidang Sumberdaya Air

Bidang Sumberdaya Air dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang SDA.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Sumber daya Air mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Perencanaan Teknis;
- b. Pembinaan / penyuluhan dan bimbingan teknis dalam bidang SDA;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana dibidang SDA;
- d. Pengaturan, pengelolaan, hasil pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil pembangunan, peningkatan, pengembangan, operasional dan pemeliharaan serta pengamanan jaringan pengairan;
- f. Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam;
- g. Pegelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan air dan sumber daya air;
- h. Pemantauan dan pengawasan penambangan bahan galian golongan C disekitar lokasi pada Daerah Aliran Sungai (DAS);
- i. Pelaksanaan Pengembangan, pengelolaan Rawa dan Pantai;
- j. Pengaturan, pengembangan dan pengelolaan air baku;



- k. Pendataan aset dibidangSDA;
- l. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan bidang SDA;
- m. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan dibidang SDA;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;

Bidang Sumberdaya Air terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis SDA
- b. Seksi OP dan pemanfaatan SDA;
- c. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Prasarana SDA;

4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdibidang cipta karya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi.

- a. Penyelenggaraan perencanaan teknis.
- b. Penyelenggaraan pembinaan/bantuan teknis, pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan keciptakaryaan;
- c. Penyediaan dan pengelolaan air bersih, drainase, air tanah, penggelontoran kota, sanitasi dan fasilitas umum;
- d. Pelaksanaan pendataan, pengolahan data base bidang kecipta karyaan;
- e. Pelaksanaan rekomendasi pemberian Ijin Mendirikan Bangunan;
- f. Pelaksanaan pelaporan dibidang kecipta karyaan;
- g. Pelaksanaan pendataan aset-aset dibidang kecipta karyaan;
- h. Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis Keciaptakaryaan;
- b. Seksi Pembangunan Gedung
- c. Seksi Air Minum dan PenyehatanLingkungan;



5. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang Penataan Ruang.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
- b. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
- c. Pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pemanfaatan ruang;
- e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Penataan Ruang;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan Teknis Penataan Ruang
- b. Seksi Pemanfaatan Ruang
- c. Seksi Pengendalian Ruang

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan dan Pengujian

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang Peralatan dan Pengujian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peralatan dan Pengujian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan;



- b. Penyusunan penyelenggaraan administrasi dan inventarisasi peralatan penggudangan, penyimpanan dan pendistribusian alat;
- c. Pelaksanaan kegiatan perawatan dan pengoperasian peralatan;
- d. Pelayanan peralatan kepada masyarakat dan pihak ke tiga;
- e. Pelaksanaan pelaporan pengoperasian peralatan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas pekerjaan Umum;
- g. Pelaksanaan penyelidikan, pengujian beton, tanah, baja, kayu dan bahan bangunan lainnya;
- h. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan standar pelayanan minimal dibidang pekerjaan umum;
- i. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan kalibrasi alat pengujian;
- j. Pelayanan rekomendasi hasil – hasil uji laboratorium;
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil pengujian;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas pekerjaan Umum;

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jasa konstruksi

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jasa konstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang Peralatan dan Pengujian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jasa konstruksi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. Pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- d. Pelaksanaan dan penyelenggaraan sebagian tugas dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas pekerjaan Umum;



2. Struktur Organisasi

Untuk Jelasnya dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :



3. Sumber Daya Manusia

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku dinas teknis untuk membantu Bupati, didalam pelaksanaan tugas – tugas kedinasan telah mempunyai personil yang secara kuantitas telah mencukupi, namun secara kualitas masih belum memadai. Hal ini terlihat dari jumlah tenaga teknis sebanyak 30% dan tenaga non teknis 70%. Perbandingan jumlah tenaga teknis dan tenaga non teknis ini terbalik, dimana kebutuhan yang ideal adalah 70 % tenaga teknis dan 30 % tenaga non teknis.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan periode 2016 dapat dirincikan sebagai berikut:



Keadaan : 31 Desember 2018

NO	NAMA	L / P	Gol	Eselon	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ir. Mohamad Amir Ali	L	IV/ b		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah	S1	Diklatpim Tk. III	
2	H. Abdul Kadir,ST	L	IV/a		Kepala Bidang SDA	S1	Dk pim Tk IV	
3	Muhammad Supriyadin, ST	L	III/c		Kepala Bidang Cipta Karya	S1	-	
4	Muhammad Sarjan, ST, MT	L	III/d		Kepala Bidang Penataan Ruang	S2	-	
5	Lalu Marzawan,SE	L	III/d		Kasubbag Umum & Kepegawaian	S1	Adum	
6	JOHAN ZAMRONI BAROKAH, ST.	L	III/d		Kasubbag Perencanaan	S1		
7	Tahmid, S. Sos	L	III/c		Kasubag Keuangan	S1	-	
8	Ekanita Sovianti, ST, MT	P	III/c		Kasi Pengembangan Kebinamargaan	S2	-	
9	L. ARTAWAN	L	III/c		Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Sarmud	Adum	
10	Massadri Zulkarnain, ST	L	III/b		Kasi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan	S1	-	
11	Nurul Chaerani, ST	P	III/d		Kasi Pengembangan Pengairan	S1	DiklatPim TK IV	
12	Zulkifli, ST. MT	P	III/d		Kasi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air	S2	-	
13	Munawardi, ST	L	III/c		Kasi pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pengairan	S1		
14	Muhmad Nasri,ST	L	III/d		Kasi Perencanaan Teknis Keciptakaryaan	S1		



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	NAMA	L / P	Gol	Eselon	JABATAN	Pendidikan Terakhir	DIKLAT PIM yang telah diikuti	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	H. Zaenal Abidin, ST	L	III/c		Kasi Pembangunan Gedung	S1		
16	Suraje, ST	L	III/c		Kasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	S1		
17	Amir Hamzah, ST	L	III/d		Kasi Pemanfaatan Ruang	S1		
18	Jalaludin, ST	L	III/c		Kasi Pengendalian Ruang	S1	Diklatpim Tk. IV	
19	Husnul Khatimah, ST, MT	L	III/d		Kasi Perencanaan Teknis Penataan Ruang	S2		
20	ZULKARNAEN DM	L	III/c		Kepala UPT Peralatan dan Pengujian	STM		
21	H. SUTRISMAN	L	III/b		TU UPT Peralatan dan Pengujian	SMA		
22	Ahmad Halifi, SE	L	III/c		TU UPT Jasa Konstruksi	S1		

Jumlah pegawai untuk mendukung semua kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah 303 orang. Dan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Jumlah Pegawai (Org)	Kualifikasi pendidikan				
	SD	SMP	SMU/MA	D3	S1/S2
303	34	29	189	2	49

Berdasarkan pangkat dan golongan Berdasarkan Pangkat dan Golongan:



Jumlah Pegawai 303 Orang	Pangkat dan Golongan		Jumlah (Orang)
	I	A	2
		B	7
		C	19
		D	16
	II	A	20
		B	20
		C	131
		D	16
	III	A	11
		B	23
		C	23
		D	13
	IV	A	1
		B	1
		C	-
		D	-
		E	-

Ruang Jumlah Jabatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

No	Nama Jabatan	Status Jabatan		Pendidikan Terakhir
		Isi	Kosong	
	Kepala Dinas	1		SI
	Sekretaris	-		-
	Kabid	4		SI&S2
	Kasi/Kasubag/KUPT	17		S1 dan STM/SMA
	Staf	281		S3/S1/SMA/STM/SMP/SD

Jumlah Personil Yang Mengikuti Diklat/Perjenjangan



No	Pangkat/ Golongan	Diklat Struktural yg telah diikuti	Jumlah	Keterangan
1	Pembina Utama Muda /IVb	DK PIM TK III	1	Orang
2	Pembina Tingkat I /IVb	DK PIM TK III	1	Orang
3	Pembina / Va	DK PIM TI III	2	Orang
		DK PIM TI IV	1	
		ADUM	8	Orang
4	Penata Tk I. III/d	DK PIM TI IV	3	Orang
		ADUM	7	Orang
5	Penata III/c	DK PIM TI IV	3	Orang
		ADUM	4	Orang

4. Kondisi Pelayanan SKPD

a. Kondisi Bidang Sumberdaya Air

Luas areal Daerah Irigasi terdiri 3 kewenangan yakni untuk luas areal diatas 3000 adalah kewenangan Pusat sebesar 24.495 Ha, luas areal 1000 s/d 3000 adalah kewenangan Propinsi sebesar 12.911 Ha dan luas areal dibawah 1000 adalah kewenangan Kabupaten yakni sebesar 13.123 Ha. Total cakupan layanan jaringan irigasi tahun 2010 adalah 49.809 Ha. Untuk tahun 2014 49.517 Ha. Pengurangan areal irigasi terjadi akibat alih fungsi lahan seperti pada pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL), pembangunan pemukiman, perdagangan, jasa, dll. Kondisi jaringan irigasi kewenangan Kabupaten pada tahun 2010 dalam kondisi baik sepanjang 75.879,65 m (57.26%) sedangkan kondisi rusak sepanjang 56.664,35 m (42.74%), pada kondisi tahun 2015 yang baik sepanjang 94.647,13 m (71.10%) dan yang rusak sepanjang 38.476,87 m (28.90%).

Tabel 2.16
Luas Areal Irigasi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014



No	Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)		Panjang Saluran (m)		
		Potensial	Irigasi	Induk	Sekunder	Total
1	>3000 Ha kewenangan Pusat	24.828	24.495	60.601	191.065	251.666
2	1000 – 3000 Ha kewenangan Propinsi	13.933	12.911	30.654	108.724	139.378
3	<1000 Ha kewenangan Kabupaten	12.706	12.403.35	37.720	89.593	127.313
	Total	51.467	49.809.81	128.975	389.382	518.357

Sumber: Dinas PU , 2015

Dalam pengelolaan irigasi sejalan dengan arahan reformasi pembangunan saat ini kondisi Sektor irigasi sebagai berikut :

- 1). Urusan irigasi telah didesentralisasi ke Pemerintah Propinsi dan Kabupaten
 - Secara bertahap irigasi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten.
 - Pembentukan dan pembinaan GP3A/P3A diserahkan ke Pemerintah Kabupaten.
- 2). Pengelolaan air dan sumber air (sungai, rawa, danau/waduk) pada wilayah sungai di satu Propinsi ditugasperbantukan ke Pemerintah Propinsi dan Pusat
- 3). Pembangunan Prasarana di bidang Pengairan dilaksanakan oleh Pemerintah beserta Pemerintah Daerah.
- 4). Pelaksanaan O & P Prasarana Pengairan
 - Pemerintah Pusat (Waduk, embung) dengan luas >3000 Ha
 - Pemerintah Propinsi (Jaringan Irigasi Lintas Kabupaten) dengan luas 1000-3000 Ha
 - Pemerintah Kabupaten (Irigasi dalam wilayahnya) dengan luas <1000 Ha
 - P 3 A untuk Daerah Irigasi < 500 Ha

Pembangunan prasarana irigasi sampai dengan tahun 2015 sudah banyak yang dilaksanakan. Sesuai data inventarisasi yang dihimpun pengairan.



1). Irigasi Pemerintah

No	Irigasi Pemerintah	Jumlah	Satuan	Kewenangan Kabupaten (PU)
1.	Luas sawah Irigasi	49.517	Ha	13.123
2.	Jumlah Daerah Irigasi (DI)	69	DI	58
3.	Waduk/Bendungan	2	Buah	
4.	Embung	104	Buah	
5.	Bendung	50	Buah	
6.	Saluran Primer	129.244	M	
7.	Saluran Sekunder	394.924	M	
8.	Saluran Suplesi (HLD)	24.000	M	
9.	Jalan Inspeksi	227.667	M	
10.	Bangunan bagi/sadap	231	Buah	
11.	Bangunan air pelengkap	1.149	Buah	
12.	Pintu air	1.621	Buah	
13.	Rumah Dinas Jupeng/JPA	171	Buah	
14.	Kantor	12	Buah	

2). Irigasi Desa

Areal = 8.892Ha
 Jumlah daerah irigasi = 242 Buah
 Telah direhab 147 buah = 5.690Ha

3.) Sawah Tadah Hujan

Areal sawah tadah hujan sebagian besar berada dikecamatan Praya Barat, Pujut dan Praya Timur dan Praya Barat Daya

4). Cakupan Areal Prasarana Irigasi

Wilayah kerja pengairan meliputi 69 daerah irigasi dengan luas areal 49.517 Ha terdiri dari :

- 63 daerah irigasi pada wilayah kerja Kabupaten Lombok Tengah dengan luas areal 49.517 Ha
- 7 daerah irigasi lintas kabupaten dengan luas areal 8.987 Ha
- 24.000 m' saluran suplesi lintas kabupaten (HLD)

Irigasi lintas kabupaten meliputi :

- Daerah irigasi Bilekere = 3.580Ha
- Daerah irigasi Batujai = 3.300 Ha



- Daerah irigasi Pengga	=	(di Lobar)	
- Daerah irigasi Bisobokah	=	3.589	Ha
- Daerah irigasi Rutus	=	1.743	Ha
- Daerah irigasi Pelapak	=	747	Ha
- Daerah irigasi Embung pare	=	2.783	Ha
- Daerah irigasi Tibunangka	=	2227	Ha
- Daerah irigasi Embung Bringe	=	350	H
J u m l a h	=	18.318	Ha

5) Kondisi Jaringan Irigasi

No	Jenis bangunan	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
1.	Waduk/embung	Buah	104	104	-
2.	Bendung	Buah	50	50	-
3.	Saluran primer	Meter	130.215	90.979	39.236
4.	Saluran sekunder	Meter	389.142	88.353	299.789
5.	Bangunan bagi/sadap	Buah	231	89	142
6.	Jalan inspeksi	Meter	227.667	43.165	184.502
7.	Pintu air	Buah	1.621	422	1.199
8.	Sal. suplesi (HLD)	Meter	24.000	18.121	5.879
9.	Bangunan air	Buah	4.424	3.374	1.050
10.	Embung Rakyat	Buah	615	615	-
11.	Bendung Rakyat	Buah	114	80	34
	Jar. Irigasi pipa 400 mm	M	2.000	2000	-

6) Kondisi Sumber daya air

Potensi sumber daya air diklasifikasikan menjadi 3 (tiga):

- Air hujan
- Air permukaan
- Air tanah

Air permukaan yang ada diwilayah Kabupaten Lombok Tengah dibagi menjadi 3 (tiga) DAS yaitu:

- DAS Dodokan meliputi:
Kecamatan Batukliang, Jonggat, Kopang, Praya, Janapria, Praya Barat, Praya Barat Daya dan Pujut
- DAS meninting meliputi:
Kecamatan Batukliang Utara, Pringgarata, Jonggat dan Kopang



- DAS Menanga meliputi :
Kecamatan Batukliang, Janapria, Praya dan Kopang

b. Kondisi Bidang Bina Marga

Riwayat penanganan jalan pertahun yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Marga adalah sebagai berikut:

- ✓ Kondisi jalan mantap (Aspal Baik dan Aspal Sedang) pada tahun 2010 sebesar 40,12% dengan panjang jalan Lapen (Aspal Sedang) yaitu sebesar 195,77 Km (26,47% dari panjang jalan kabupaten) dan panjang jalan aspal Hotmix (kondisi baik) 100,88 Km. Hal tersebut karena terbatasnya anggaran daerah untuk penanganan jalan, sedangkan masih banyak jalan yang membutuhkan penanganan segera. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka penanganan jalan dengan menggunakan aspal lapen lebih diutamakan.
- ✓ Tahun 2010 dan 2011 tidak ada kegiatan pemeliharaan rutin jalan, sementara pada tahun 2012 pemeliharaan rutin hanya dilakukan pada 8 ruas jalan saja. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kondisi jalan yang sangat signifikan karena sebagian besar jalan kabupaten hanya dengan permukaan Lapisan Penetrasi (Lapen). Kondisi jalan pada akhir tahun 2012 mencapai 16,76%.
- ✓ Pemeliharaan Rutin Jalan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kondisi jalan agar dapat tetap bertahan hingga mencapai umur rencana, pada tahun 2010 dan 2011 tidak dilakukan pemeliharaan rutin terhadap ruas-ruas yang sudah tertangani sebelumnya.
- ✓ Peningkatan kondisi jalan pada tahun 2013 hingga mencapai 60,11% pada tahun 2014 dapat tercapai melalui Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Kabupaten yang dimulai sejak akhir tahun 2012 dan 2013. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Kabupaten ini sumber dananya berasal dari Pinjaman PIP (Pusat Investasi Pemerintah) dan APBD Kabupaten Lombok Tengah.
- ✓ Pada akhir tahun 2014, kondisi jalan mantap (Aspal Baik dan Aspal Sedang) sebesar 60,11% dengan panjang jalan Hotmix 435,67 Km (dengan kondisi baik) atau 58,92% dari seluruh panjang jalan kabupaten. Peningkatan panjang



jalan Hotmix pada tahun 2010 hingga tahun 2014 sangat signifikan dari 100,08 Km menjadi 435,67 Km.

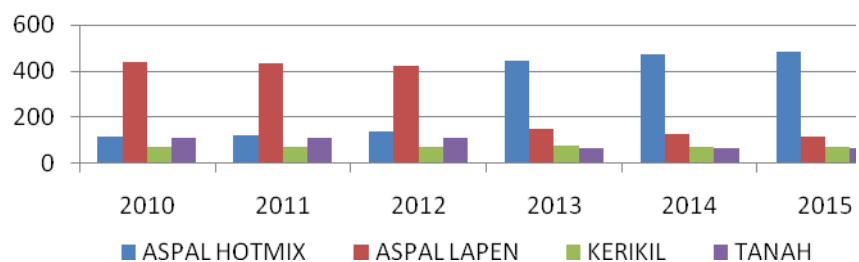
- ✓ Pada Tahun 2015, dengan alokasi dana yang cukup besar untuk bidang jalan melalui kegiatan peningkatan jalan, rehabilitasi/pemeliharaan berkala dan rutin jalan kabupaten, kondisi jalan mantap (Aspal Baik dan Aspal Sedang) meningkat menjadi 64,55% atau 477,30 Km.

Berikut ini grafik yang menunjukkan perbandingan jenis permukaan jalan dan kondisi jalan tahun 2010 hingga 2015

Jenis Permukaan Jalan (Hotmix&Lapen) Jalan Kabupaten

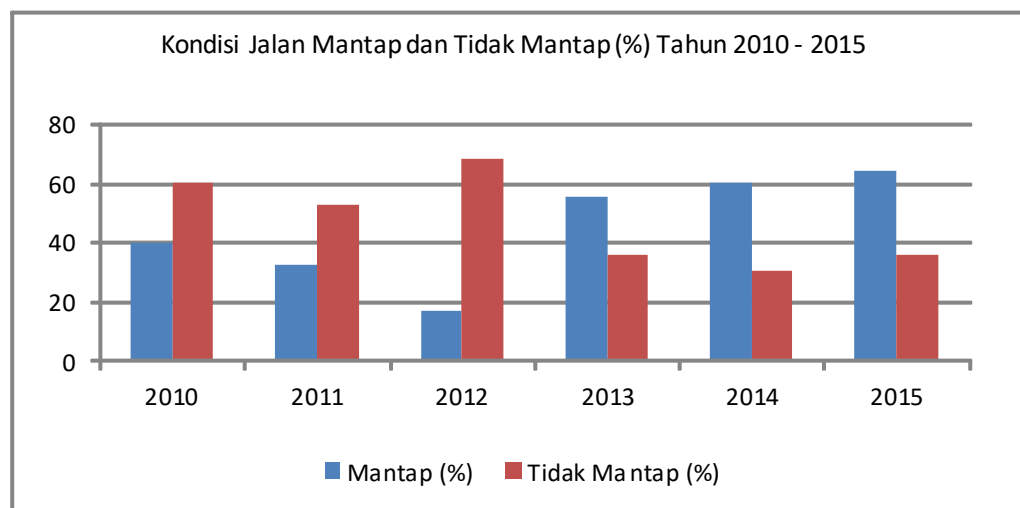
NO.	TAHUN	JENIS PERMUKAAN JALAN (KM)			
		ASPAL HOTMIX	ASPAL LAPEN	KERIKIL	TANAH
1.	2010	115,08	440,22	74,50	109,64
2.	2011	122,03	433,27	74,50	109,64
3.	2012	138,19	420,31	72,30	108,64
4.	2013	442,13	148,77	80,20	68,60
5.	2014	468,18	128,06	72,02	71,15
6.	2015	485,93	115,01	70,75	67,75

PERBANDINGAN KONDISI BERDASARKAN JENIS PERMUKAAN
JALAN
TAHUN 2010 - 2015



Kondisi Jalan Kabupaten

NO.	TAHUN	MANTAP		TIDAK MANTAP	
		KM	%	KM	%
1.	2010	296,65	40,12	442,79	59,88
2.	2011	239,00	32,32	390,00	52,85
3.	2012	123,94	16,76	506,84	68,55
4.	2013	407,98	55,17	262,86	35,55
5.	2014	444,47	60,11	223,82	30,27
6.	2015	477,03	64,55	262,15	35,45



Menunjukkan penurunan kondisi jalan sebagai akibat kerusakan pada permukaan jalan sebagai akibat dari kondisi lalu lintas dan non lalu lintas

Garis A: Menunjukkan Penurunan kondisi yang mengakibatkan kemampuan jalan dalam mendukung beban sumbu komulatif berkurang atau dengan kata lain umur rencana perkerasan jalan akan berkurang

Garis B: Menunjukkan pengaruh jika dilakukannya pemeliharaan, yaitu akan memperlambat tingkat kerusakan jalan (titik 1), memperbaiki kondisi mendekati kondisi awal (titik 2 dan titik 3)

Sumber: Teknik Pengelolaan Jalan – Departemen PU Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Pengembangan Prasarana Transportasi (April 2005)



Berdasarkan tabel-tabel diatas sangat perlunya dilakukan pemeliharaan rutin adalah untuk mempertahankan kondisi jalan hingga mencapai umur rencana.

Indikator Sasaran Yang Telah Dicapai

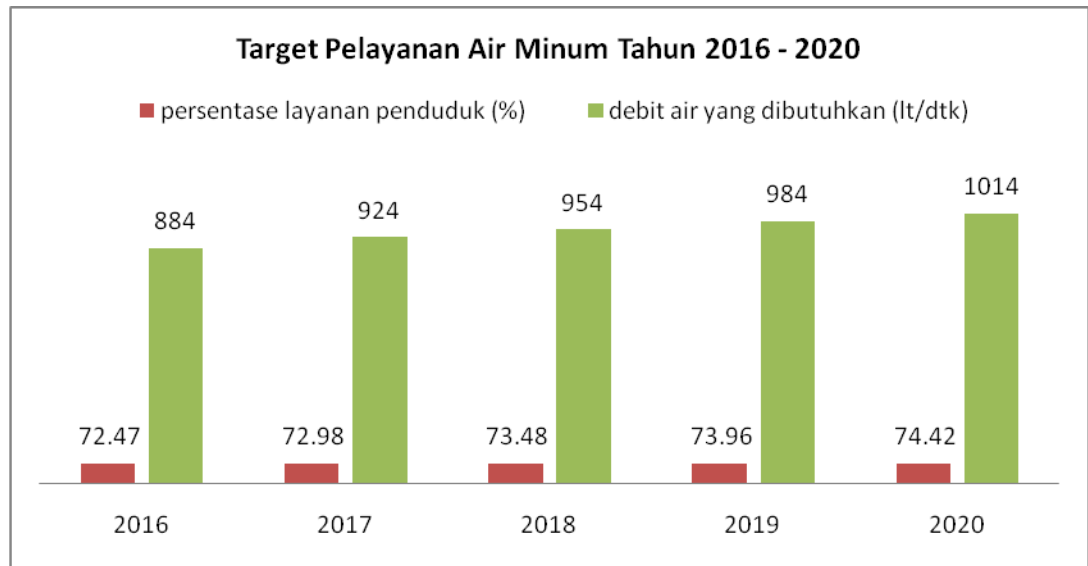
- ✓ Kondisi jalan mantap (Aspal Baik dan Aspal Sedang) pada tahun 2010 sebesar 40,12% dengan panjang jalan Lapen (Aspal Sedang) yaitu sepanjang 195,77 Km (26,47% dari panjang jalan kabupaten) dan panjang jalan aspal Hotmix (kondisi baik) 100,88 Km. Hal tersebut karena terbatasnya anggaran daerah untuk penangan jalan, sedangkan masih banyak jalan yang membutuhkan penanganan segera. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka penanganan jalan dengan menggunakan aspal lapen lebih diutamakan.
- ✓ Tahun 2010 dan 2011 tidak ada kegiatan pemeliharaan rutin jalan, sementara pada tahun 2012 pemeliharaan rutin hanya dilakukan pada 8 ruas jalan saja. Kondisi ini mengakibatkan penurunan kondisi jalan yang sangat signifikan karena sebagian besar jalan kabupaten hanya dengan permukaan Lapisan Penetrasi (Lapen). Kondisi jalan pada akhir tahun 2012 mencapai 16,76%. Pemeliharaan Rutin Jalan merupakan salah satu cara untuk mempertahankan kondisi jalan agar dapat tetap bertahan hingga mencapai umur rencana, pada tahun 2010 dan 2011 tidak dilakukan pemeliharaan rutin terhadap ruas-ruas yang sudah tertangani sebelumnya.
- ✓ Peningkatan kondisi jalan pada tahun 2013 hingga mencapai 60,11% pada tahun 2014 dapat tercapai melalui Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Kabupaten yang dimulai sejak akhir tahun 2012 dan 2013. Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Kabupaten ini sumber dananya berasal dari Pinjaman PIP (Pusat Investasi Pemerintah) dan APBD Kabupaten Lombok Tengah.
- ✓ Pada akhir tahun 2014, kondisi jalan mantap (Aspal Baik dan Aspal Sedang) sebesar 60,11% dengan panjang jalan Hotmix 435,67 Km (dengan kondisi baik) atau 58,92% dari seluruh panjang jalan kabupaten. Peningkatan panjang jalan Hotmix pada tahun 2010 hingga tahun 2014 sangat signifikan dari 100,08 Km menjadi 435,67 Km.



- ✓ Pada tahun 2010 indikator kinerja kawasan agropolitan sebesar 8,10%, hingga akhir tahun 2015 mencapai 16,63% sehingga penanganan jalan dikawasan agropolitan sudah mencapai target.
- ✓ Untuk kawasan wisata pada tahun 2010 sebesar 6.75% dan pada akhir tahun 2015 mencapai 17,28%
- ✓ Pada kawasan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) pada tahun 2010 sebesar 9.1% dan pencapaian hingga akhir 2015 sebanyak 23.67% yang terealisasi sebesar 16,35%, disebabkan karena wilayah-wilayah yang termasuk dalam kawasan PKW di RTRW Kabupaten Lombok Tengah sebagian besar dalam kondisi mantap, karena itu peningkatannya tidak terlalu banyak.
- ✓ Pada indikator persentase peningkatan kualitas jalan desa dan kebijakan daerah untuk jalan desa. Tidak bisa tercapai sasarannya disebabkan karena Pemerintah Daerah belum menetapkan SK mengenai status jalan desa, sehingga untuk presentase peningkatan kualitas jalan desa tidak bisa terukur karena belum adanya data base jalan desa yang dijadikan sebagai dasar perhitungan peningkatan kualitas.
- ✓ Pekerjaan Pembangunan Jembatan, pada tahun 2010 indikator jumlah jembatan adalah 226 hingga 2015 indikator capaian sebesar 234 tidak tercapai karena pekerjaan yang terlaksana sejak tahun 2010 sampai 2015 hanya pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan.

c. Kondisi Bidang Cipta Karya

- Pada tahun 2015, persentase cakupan layanan air bersih Kabupaten Lombok Tengah mencapai 71,94%. Kemudian, ditargetkan pada akhir RPJMD Tahun 2016 - 2020, cakupan layanan air bersih melalui sistem perpipaan akan bertambah menjadi 74,42% dengan debit air bersih sebesar 1.014lt/dtk dan rata-rata pemanfaat sebanyak 3.000KK/tahun. Untuk rincian target pelayanan air bersih 2016-2021 dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Dari diagram diatas, debit air baku total yang dibutuhkan untuk melayani 74,42% penduduk Kabupaten Lombok Tengah mencapai 1.014lt/dtk dan akan diperoleh melalui:

1. Debit air sebesar 816 lt/dtk akan diperoleh dari PDAM Kabupaten Lombok Tengah. Ditargetkan pada tahun 2016, jaringan baru dari MA. Sesere dan MA. TibuLempanas akan mampu menambah kapasitas air baku sebesar 450 lt/dtk sehingga jika kedua jaringan baru tersebut berfungsi penuh, kapasitas pengambilan air baku PDAM mencapai total 816lt/dtk.
2. Kapasitas pengambilan air baku sebesar 198 lt/dtk ditargetkan akan dapat dipenuhi melalui beberapa program penyediaan air bersih diantaranya Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (SPAMDes) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (PAMSIMAS) yang memanfaatkan sumur bor sebagai sumber air bakunya. Selain itu, kedepannya akan dibangun jaringan baru bersumber dari beberapa mata air potensial yang terdata dalam Dokumen Rencana Induk Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Lombok Tengah.

d. Kondisi Bidang Penataan Ruang

Perencanaan spasial wilayah (Rencana tata ruang wilayah) terdiri dari rencana umum berupa RTRW Kabupaten dan rencana rinci (RDTRRTBL). RTRW Kabupaten Lombok Tengah sebagai rencana umum tata ruang telah ditetapkan pada



tahun 2011 sebagai pijakan umum pembangunan spasial di kabupaten. Sebagai tindak lanjut operasioanlnya diamanatkan untuk menyusun rencana rinci berupa kawasan perkotaan, dan kawasan strategis kabupaten. Sampai dengan tahun 2015, Pemerintah Lombok Tengah telah menetapkan sejumlah dokumen rencana tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah 2011-2031 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 tahun 2011; Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2006; Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Praya dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kopang yang hingga saat ini keduanya dalam proses legislasi pada tahapan konsultasi teknis di pusat. Selain itu, telah disusun pula Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Perkotaan Praya berdasarkan Perbup Nomor 80 Tahun 2015 dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Kuta melalui Perbup Nomor 81 Tahun 2015.

Permintaan izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Tengah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, namun belum diimbangi dengan penyediaan regulasi/peraturan yang ada seperti perda Rencana Detail Tata Ruang daerah (RDTR). Untuk mengatasi permintaan perizinan tersebut telah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKRD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan unsur / perwakilan SKPD terkait dalam rangka memfasilitasi izin pemanfaatan ruang.

5. Tantangan Pelayanan SKPD

Selanjutnya tantangan masing-masing bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangdiuraikan di bawah ini.

a. Tantangan Pembangunan Bidang Bina Marga

Tantangan pembangunan bidang Jalan meliputi:

- Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi wilayah harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam menunjang sektor riil dan sistem logistik daerah dan nasional.
- Meningkatkan pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk mempertahankan kondisi prasarana jalan yang ada.



- Menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan Kawasan Agropolitan, Kawasan Agrowisata dan Kawasan PKW dan percepatan pembangunan Jaringan Jalan *Outer Ring Road*.
- Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam, maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta *outlet*.
- Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada wilayah perkotaan di kabupaten Lombok Tengah

b. Tantangan Pembangunan Bidang Sumberdaya Air

Tantangan pembangunan Bidang Sumberdaya Air meliputi:

- Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju *deforestasi* dan eksplorasi air tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan *land subsidence*.
- Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan dikhawatirkan dapat mempengaruhi target *Millennium Development Goals* (MDGs) yang menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
- Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor irigasi, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
- Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi
- Melakukan pengelolaan resikopelayanan yang diakibatkan oleh rusaknya jaringan irigasi dan tingginya sedimentasi serta kekeringan.
- Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang irigasi dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

c. Tantangan Pembangunan Bidang Cipta Karya



Tantangan pembangunan bidang ke-Cipta Karya-an meliputi:

- Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) serta mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya kekumuhan dan banjir.
- Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (*green building*) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.

d. Tantangan Bidang Penataan Ruang

- Meningkatkan dan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang terbuka hijau publik
- Melanjutkan program percepatan pembangunan di kawasan perkotaan.

e. Tantangan Sekretariat Dinas

Tantangan Sekretariat Dinas meliputi:

- Peningkatan kebutuhan personil teknis dan sarana prasarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- Reformasi birokrasi dalam rangka mencapai 3 (tiga) *strategic goals* yaitu: kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi, kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kontribusi bagi peningkatan kualitas lingkungan.
- Peningkatan peran koordinasi penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum antar tingkatan pemerintahan dan antar pelaku pembangunan.
- Penyelenggaraan *good governance* yang efektif untuk mengimbangi tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
- Pengembangan kapasitas SDM untuk mendukung perubahan peran ke depan yang diharapkan berubah dari yang semula menjadi lebih baik dan handal.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun terakhir, serta permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan



maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas PUPR di masa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

a) Sekretariat

Permasalahan pada sekretariat Dinas yakni pada penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal, masih kurangnya tenaga pengelola kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat, kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah belum optimal, belum optimalnya data dan informasi Dinas Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta peran aktif Dinas Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah sebagai perpanjangan tangan Bupati selaku Kepala Daerah masih perlu ditingkatkan

b) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Permasalahan utama urusan penataan ruang adalah perencanaan ruang yang belum dapat mewujudkan fungsi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Sedangkan di bidang infrastruktur permasalahan utama adalah penyediaan infrastruktur yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kurangnya acuan penerapan dan implementasi RTRW serta kurangnya sumber daya aparatur dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) tata ruang masih terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas masih merupakan kendala dalam mewujudkan fungsi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Belum seluruhnya jalan dan jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap sesuai dengan kapasitasnya, minimnya sarana pendukung prasarana jalan terutama penerangan jalan dan fasilitas keselamatan jalan

Cakupan layanan irigasi yang belum berfungsi secara optimal yang disebabkan oleh minimnya operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi serta belum terintegrasinya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi secara representatif yang mengakibatkan defisit imbalan air irigasi pada beberapa DI/water District di musim kemarau serta bangunan irigasi yang sudah berumur, serta kurang



optimalnya koordinasi antar GP3A dan daya dukung masyarakat petani dalam pengelolaan air irigasi.

Cakupan layanan air bersih masih minim karena minimnya titik mata air dan debit air sehingga belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses terhadap air bersih yang layak, belum optimalnya peran kabupaten dalam menyadarkan masyarakat tentang pengelolaan air minum.

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah sebagai berikut:

- Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum;
- Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah;
- Masih terdapatnya rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan;
- Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan;
- Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya belum optimal;
- Fungsi pengendalian dan penataan ruang yang belum konsisten;
- Rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang;
- Masih belum optimalnya pemanfaatan surat Ijin Mendirikan Bangunan dalam mengendalikan fungsi tata ruang;
- Belum optimalnya upaya pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Belum efektifnya pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Belum optimalnya pemanfaatan lahan terutama pada lahan kritis.
- Sebagian besar ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak layak dan kritis;
- Masih kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu marka pengaman jalan dan terminal;
- Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan irigasi;

2. Asumsi Dan Faktor Penentu Keberhasilan (FPK)

Asumsi atau assumptions merupakan kesimpulan/conclusions (bukan “anggapan”) tentang faktor – faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi. Dalam kaitannya dengan penyusunan perencanaan stratejik organisasi, asumsi dapat disebut sebagai “asumsi organisasi”.

Asumsi ini harus mencantumkan semua kondisi atau keadaan selengkap – lengkapnya dan tidak dibenarkan untuk menghilangkan atau menghapuskan sebagian kecil apapun data tentang kondisi yang berkaitan dengan visi dan misi serta nilai – nilai organisasi. Hal ini penting, karena hal yang kecil pada masa kini dapat saja menjadi hal yang besar pada masa depan. Hal ini juga mencegah agar organisasi tidak menyusun suatu perencanaan stratejik dengan dasar atau anggapan bahwa dimasa depan tidak akan terjadi suatu situasi atau keadaan yang maha sulit.

Perencanaan ini memerlukan dasar yang konsisten. Dengan mengembangkan asumsi – asumsi yang penting, manajemen dapat memperoleh dasar – dasar perencanaan stratejik, dan untuk selanjutnya menyusun rencana kerja atau “action plan”, implementasi perencanaan stratejik yang mantap.

Setelah melakukan pencermatan (scanning) kekuatan dan kelemahan serta pencermatan peluang dan tantangan lingkungan stratejik, yang pada hakekatnya merupakan pendataan dan pengidentifikasian sebagai pra analisis, selanjutnya data tersebut disusun dalam suatu diagram matriks SWOT. Dengan matriks SWOT dapat diperoleh faktor – faktor dominan yang merupakan prioritas, menjadi asumsi (ASI).

Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan sehingga berfungsi untuk lebih memfokuskan strateji organisasi dalam rangka pencapaian misi dan tujuan secara efektif dan efisien. Liputan FPK cukup luas, serta sangat erat kaitannya dengan pencapaian visi dan misi, dan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan misinya. Pada umumnya jumlah FPK tidak lebih dari sepuluh dan bahkan banyak perencanaan yang mempunyai empat sampai tujuh FPK.

Faktor-faktor penentu keberhasilan ini sangat membantu para pimpinan organisasi dalam mengembangkan suatu perencanaan stratejik agar lebih mudah dikomunikasikan dan dilaksanakan.

Berdasarkan hal diatas, maka dapat disajikan faktor-faktor penentu keberhasilan dan strategi sebagaimana berikut ini :

Analisis Stratejik dan Pilihan (Strategic Analysis dan Choises)

<div style="text-align: center;"> Internal (ALI) Eksternal (ALE) </div>	Strenght (Kekuatan) 1 <i>Terbentuknya Dinas PU dilengkapi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), sesuai PP No 41 tahun 2008 dan Perbup No 29 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</i> 2 <i>Tersedianya Sumber Daya Aparatur dengan jumlah memadai</i> 3 <i>Fasilitas kerja memadai</i> 4 <i>Motivasi Aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya cukup tinggi</i>	Weakness (kelemahan) 1 <i>Kualitas Sumber Daya Aparatur belum optimal</i> 2 <i>Kompetensi beberapa pejabat tidak sesuai dengan jabatannya</i> 3 <i>Belum Proporsionalnya jumlah tenaga teknis dan Non teknis</i> 4 <i>Sarana penunjang terutama yang terkait dengan alat-alat berat belum memadai</i>
	Opportunity (Peluang) 1 <i>Komitmen Pemda dalam pengalokasian anggaran cukup tinggi</i> 2 <i>Tersedianya sumber-sumber pembiayaan alternatif</i> 3 <i>Peraturan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ke-PU-an sudah tersedia</i> 4 <i>Adanya perguruan tinggi, LSM dan kelembagaan masyarakat yang siap bekerja sama</i>	Strategi SO 1 <i>Memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk merencanakan pembangunan didesa. (bottom Up)</i> 2 <i>Menjalin kerja sama dg PTN, PTS serta LSM dalam survey, pengelolaan (kemitraan) aset² kimpraswil.</i> 3 <i>Meningkatkan peran TOGA dan TOMA dalam memberdayakan masyarakat</i> 4 <i>Meningkatkan kesadaran dalam tertib pemanfaatan prasarana kepada masyarakat.</i>
	Threats (Tantangan) 1 <i>Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah masih rendah</i> 2 <i>Kondisi Infrastruktur belum memadai</i> 3 <i>Kapasitas kelembagaan terutama di tingkat masyarakat belum memadai</i> 4 <i>Kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Bidang ke-PU-an masih rendah</i>	Strategi ST. 1 <i>Menumbuhkan kemandirian masyarakat untuk mampu membiayai pemeliharaan prasarana desa.</i> 2 <i>Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan prasarana melalui pola KSO (kerjasama operasional).</i>
		Strategi WO 1 <i>Memberikan kesempatan diklat kepada aparatur kimpraswil dan penyuluhan kepada masyarakat.</i> 2 <i>Pemberian stimulan kepada masyarakat untuk dikembangkan menjadi lebih besar dalam pengelolaan.</i> 3 <i>Kerjasama dengan para pakar utk menetapkan PROTAP.</i> 4 <i>Penyerahan program yang bersifat perawatan (pemeliharaan rutin) kepada masyarakat/swasta (pola KSO).</i>
		Strategi WT 1 <i>Membatasi pembangunan prasarana secara efektif dan efisien dengan lebih mengutamakan perawatan pada prasarana yang sudah ada.</i>

Dari hal tersebut diatas maka dapat ditetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan adalah sebagai berikut :

- 1). Mengutamakan pembangunan dan pengelolaan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang aspiratif (bottom up).
- 2). Pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara kontinyu dan berkesinambungan.
- 3). Menjalin kerjasama dengan para pakar dari PTN, PTS, TOGA, TOMA serta LSM dalam perencanaan dan pengelolaan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.



- 4). Memberdayakan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 5). Mengutamakan perawatan (pemeliharaan) prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sudah ada, membatasi secara selektif, efektif dan efisien pembangunan prasarana yang relatif membutuhkan dana besar.

Penentuan Peringkat Faktor

3. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

No	Faktor	Bobot	Rating	Score (Bbt x Rtg)	Prioritas
I	<u>Kekuatan (Strenght)</u>				
1.	<i>Terbentuknya Dinas PU dilengkapi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas), sesuai PP No 41 tahun 2008 dan Perbup No 29 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</i>	35	4	140	I
2.	<i>Tersedianya Sumber Daya Aparatur dengan jumlah memadai</i>	25	3	75	II
3.	<i>Fasilitas kerja memadai</i>	20	2	40	IV
4.	<i>Motivasi Aparatur untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya cukup tinggi</i>	20	3	60	III
	<i>J u m l a h</i>	100			

II	<u>Kelemahan (Weakness)</u>				
1.	<i>Kompetensi beberapa pejabat tidak sesuai dengan jabatannya</i>	25	3	75	II
2.	<i>Kualitas Sumber Daya Aparatur belum optimal</i>	30	4	120	I
3.	<i>Belum Proporsionalnya jumlah tenaga teknis dan Non teknis</i>	25	2	50	III
4.	<i>Sarana penunjang terutama yang terkait dengan alat-alat berat belum memadai</i>	20	2	40	IV
	<i>J u m l a h</i>	100			

No	Faktor	Bobot	Rating	Score (Bbt x Rtg)	Prioritas
I	<u>Peluang (Opportunity)</u>				



1.	<i>Komitmen Pemda dalam pengalokasian anggaran cukup tinggi</i>	35	4	140	I
2.	<i>Tersedianya sumber-sumber pembiayaan alternatif</i>	25	3	75	II
3.	<i>Adanya perguruan tinggi, LSM dan kelembagaan masyarakat yang siap bekerja sama</i>	15	2	30	IV
4.	<i>Peraturan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang ke-PU-an sudah tersedia</i>	25	2	50	III
	<i>J u m l a h</i>	100			

II	<u>Tantangan (Threats)</u>				
1.	<i>Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah masih rendah</i>	35	4	140	I
2.	<i>Kondisi Infrastruktur belum memadai</i>	25	3	75	II
3.	<i>Kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Bidang ke-PU-an masih rendah</i>	20	2	40	IV
4.	<i>Kapasitas kelembagaan terutama di tingkat masyarakat belum memadai</i>	20	3	60	III
	<i>J u m l a h</i>	100			

Catatan :

Mohon Penyempurnaan Nilai rating dari 1 s/d 5

Berdasarkan hasil penentuan peringkat faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangandiperolehfaktor dominan sebanyak 9 (sembilan) asumsi - asumsi yaitu sebagai berikut:

- Terbentuknya Dinas PU dilengkapi UPTD (*Unit Pelaksana Teknis Dinas*) sesuai PP No.41 Tahun 2008 dan Perbup No. 29 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, akan memberikan kejelasan terhadap tugas, wewenang dan tanggung jawab masing – masing aparatur.



- b. Tersedianya Sumber Daya Aparatur dengan jumlah memadai Cipta Karya dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar dalam pengelolaan prasarana sehingga memberikan dasar hukum serta batasan yang pasti bagi para pelaksana.
- c. Adanya Otonomi Daerah dengan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 akan memberikan kewenangan Kepala Daerah yang lebih luas untuk mengatur urusan rumah tangganya.
- d. Adanya PTN dan PTS serta LSM yang ingin bekerja sama, keberadaan Tokoh Agama/Tuan Guru, Tokoh Masyarakat di daerah yang sangat agamis dan paternalistik, akan sangat menentukan bagi pemerintah sebagai mitra didalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.
- e. Dalam tahapan pelaksanaan pengelolaan prasarana yang seringkali berujung tidak tertanganinya semua rencana yang sudah terprogram (rata-rata setiap tahun 30 % yang tertangani), di sebabkan terbatasnya alokasi dana Pemerintah yaitu DAU atau APBD murni (PAD) untuk pengelolaan prasarana dasar, sehingga harus berdasarkan skala prioritas yang sangat ketat dan menetapkan prosedur tetap (PROTAP) yang tertuang dengan jelas sebagai pedoman pelaksanaan anggaran.
- f. Adanya kualitas sumber daya aparatur yang belum optimal, sedangkan secara kuantitas cukup memadai, disamping itu adanya beberapa personal mastery yang dapat memberikan dorongan dan motivasi, maka pendidikan dan pelatihan menjadi prioritas untuk ditingkatkan.
- g. Begitu tingginya aspirasi masyarakat/ stakeholders dalam permintaan pelayanan prasarana yang mantap, karena merupakan kebutuhan dasar dan menjadi pengungkit yang strategik untuk pertumbuhan perekonomian rakyat.
- h. Perlunya sosialisasi tentang program dan pemanfaatan prasarana, akan memotivasi masyarakat/stakeholders untuk melaksanakan pengelolaan secara swadaya dan meningkatkan disiplin masyarakat.
- i. Krisis multi dimensi yang berkepanjangan, yang mengakibatkan banyak masyarakat menjadi miskin, memungkinkan sistem pengelolaan prasarana secara padat karya untuk membantu masyarakat.

3. Telaahan Visi, Misi, Tujuan Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Menelaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditunjukkan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan



selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah tersebut dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah yang dapat dimampukan pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Lombok Tengah.

Dengan demikian isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih.

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang di akhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan visi RPJPD kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

Dengan menyadari keberadaan seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya serta partisipasi aktif seluruh stakeholders, serta berpedoman pada RPJMD, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 -2021 dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang



bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- kata ‘beriman’ berarti masyarakat yang melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;
- kata ‘sejahtera’ berarti masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, papan, serta mendapatkan rasa aman;
- kata ‘bermutu’ berarti masyarakat yang mampu berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, karena punya tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.

Dalam hal ini peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, melalui Bidang Bina Marga, Bidang Pengairan, Bidang Cipta Karya diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi BERIMAN, SEJAHTERA dan BERMUTU melalui kegiatan yang dapat membangkitkan minat serta kondisi infrastruktur yang bermutu, sehingga masyarakatnya akan sejahtera dan beriman.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah akan ditempuh melalui misi Ke-empat pembangunan daerah yakni sebagai berikut:

"MENJAGA KESELARASAN, KESERASIAN DAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN KAWASAN DAN ANTAR KAWASAN DENGAN DUKUNGAN INFRA STRUKTUR YANG MEMADAI"

Misi keempat menekankan pentingnya mewujudkan penataan ruang kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur, permukiman dan sanitasi bagi masyarakat yang memadai. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan Meningkatkan kualitas pelayanan public melalui terwujudnya



Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kabupaten yang konsisten terwujudnya Infrastruktur jalan dan irigasi yang berkualitas, dan merata, terwujudnya pemukiman yang layak huni, terwujudnya infrastruktur sanitasi dan air bersih yang berkualitas dan merata serta meningkatnya Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral, berperan agar infrastruktur di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui:

- Perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan, serta berperan dalam menyediakan pelayanan air minum dan sanitasi lingkungan, infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan;
- Pemenuhan rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai. Serta pengendalian dan pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor .. tahun ... tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
MISI KETIGA: Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi dengan dukungan stabilitas kamtibmas	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan



VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA DAN BERMUTU		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
MISI KEEMPAT: Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan dengan Dukungan Infrastruktur yang Memadai	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Keterpaduan Kawasan dan Antar Kawasan	Meningkatnya Infrastruktur dalam mendukung Koneksitas wilayah Terwujudnya tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman
MISI KELIMA: Mewujudkan kepemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

3. Program Pembangunan

Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Visi, Misi Bupati terpilih dan RPJMD Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

I. Urusan Pekerjaan Umum

- 1) Program pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur



- 3) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 4) Program sarana prasarana gedung kantor
- 5) Program pembangunan jalan dan jembatan
- 6) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
- 7) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
- 8) Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum
- 9) Program penyediaan sarana prasarana gedung kantor

II. Urusan Penataan Ruang

1. Program perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang

Indikasi rencana program yang disajikan adalah oprasionalisasi dari program pembangunan menjadi satu atau beberapa program prioritas yang didistribusikan ke dalam urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD terkait yakni pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Pada bagian ini perlu disajikan faktor penghambat dan pendorong terhadap pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian visi, misi serta program dan kegiatan sebagaimana pada tabel dibawah ini:



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah :

No	Sasaran jangka menengah Renstra SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor		Keterangan
			Penghambat	Pendorong	
1	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal	Belum tertatanya dengan baik penataan aset sesuai dengan tupoksi Dinas karen SDM yang mengelola terbatas	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung penataan aset dengan baik	
2	Program pelayanan administrasi	Kurangnya tenaga pengelolaan kegiatan dan administrasi keuangan yang bersertifikat			
3	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kapasitas Monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Dinas PUPR belum optimal	Belum tersedianya SDM yang memadai untuk mengelola monev dengan baik	Tersedianya dukungan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan MONEV	
		Belum optimalnya data dan informasi Dinas Dinas PUPR yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat			
4	Program Sarana dan prasarana aparatur	Program penyediaan sarana prasarana gedung kantor			



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5	Program pembangunan jalan dan jembatan	Belum seluruhnya jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	Keterbatasan anggaran daerah (APBD) untuk penanganan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan sesuai dengan standar SPM	Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mengatasi penanganan jalan	
6	Program pengembangan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Minimnya operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi	Keterbatasan anggaran daerah (APBD) untuk penanganan operasional rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, sesuai dengan standar SPM	Tersedianya SDM dan sarana prasarana yang mampu untuk mengatasi penanganan operasional rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	
		Terdapatnya defisit imbanan air irigasi pada beberapa DI/water District di musim kemarau serta bangunan irigasi yang sudah berumur	Tidak terintegritasnya DI/Water District yang kewenangan kabupaten	Tersedianya jaringan irigasi teknis yang sudah sangat dipahami oleh para petani yang tergabung dalam GP3A	
		Kurang optimalnya koordinasi antar GP3A dan daya dukung masyarakat petani dalam pengelolaan air irigasi	Belum terkoordinasi pembagian penanganan bersama wilayah DAS yang secara kewenangan kabupaten dan propinsi	Adanya partisipasi masyarakat terutama pada DAS untuk ikut mengelola sehingga dapat berdaya guna	
7	Program pengembangan pengelolaan air minum	masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan akses terhadap air bersih yang layak	Adanya kesulitan mencari lokasi sumber air yang akan dipakai untuk air minum	Adanya saling gotong royong masyarakat untuk mendapatkan air minum yang layak	



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		Penataan lingkungan perumahan dan permukiman belum optimal sehingga masih terkesan kumuh	Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan perumahan dan permukiman sehingga masih terkesan kumuh	Masih adanya kemauan masyarakat untuk bergotong royong.	
8	Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang yang belum dapat mewujudkan fungsi ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan			

4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain;

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS tersebut maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan dinas pada Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.



BAB IV

VISI, MISI TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi Dan Misi SKPD

Berdasarkan atas nilai-nilai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta adanya perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat, selanjutnya dirumuskan dan diformulasikan ke dalam kalimat sehingga membentuk atau mencerminkan suatu Visi bersama. Visi tersebut menggambarkan suatu harapan yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut maka ditetapkan Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan mampu melayani kebutuhan masyarakat”

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut dan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai guna memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan meningkatkan pemantapan kondisi jaringan jalan serta memperlancar dan membangun prasarana jalan untuk memperluas dan melengkapi jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah emasaran, perkotaan, pedesaan, daerah terisolir dalam mendukung transportasi darat yang handal;
2. Mempertahankan dan meningkatkan serta mengembangkan SDM dan Sumber daya air untuk mendukung pertanian dalam rangka pengembangan ketahanan pangan, sumber daya air secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat memenuhi penyediaan air baku untuk berbagai kebutuhan masyarakat, industri dan sektor strategis lainnya.

2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang telah dirumuskan menjadi faktor-faktor kunci keberhasilan, berikut ini ditetapkan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi yaitu sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai Tujuan dan Sasaran		Ket
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pembangunan	Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan infrastruktur - Persentase jalan yang kondisinya baik (mantap) 	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - Program pembangunan jalan dan jembatan - Program rehabilitasi jalan dan jembatan 	
	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	Rumah tangga yang terlayani air bersih	Penyediaan sarana prasarana air bersih	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	
	Ketaatan terhadap RTRW	Persentase ketaatan terhadap RTRW		Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
Terwujudnya layanan irigasi yang optimal	Rasio ketersediaan debit air irigasi	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan Layanan jaringan Irigasi - Debit air 	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan meningkatkan kinerja OP	<ul style="list-style-type: none"> - Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 	
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai LKJIP SKPD	Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyediaan Sarana Prasaran Gedung Kantor 	



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Matrix Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah kinerja SKPD serta target kinerja SKPD pertahun

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcam) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target					Kondisi Akhir 2021
							2017	2018	2019	2020	2021	
							Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	
Meningkatnya layanan Irigasi		Persentase Areal Irigasi dalam Kondisi Baik			%	82,52	85,15	87,78	90,41	93,04	95,66	95,66
	Rasio ketersediaan debit air irigasi	Debit air			L/s	23,108	23,108	23,108	23,108	23,108	23,108	23,108
		Cakupan Layanan Irigasi			Ha	13,123.35	13,123.35	13,123.35	13,123.35	13,123.35	13,123.35	13,123.35
			I. Program Pengembangan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya	Cakupan Layanan Irigasi	Ha	49,517 (semua Kewenangan) 13.125,35 (Kewenangan Kabupaten)	49.517 (semua Kewenangan) 13.123,35 (Kewenangan Kabupaten)	49.517 (semua Kewenangan) 13.123,35 (Kewenangan Kabupaten)	49.517 (semua Kewenangan) 13.123,35 (Kewenangan Kabupaten)	49.517 (semua Kewenangan) 13.123,35 (Kewenangan Kabupaten)	49.517 (semua Kewenangan) 13.123,35 (Kewenangan Kabupaten)	49.517 (semua Kewenangan) 13.123,35 (Kewenangan Kabupaten)
				Persentase panjang saluran dalam kondisi baik (Total panjang saluran: 133.124)	%	109.851 m (82,52%)	113.351 m (85,15%)	116.851 m (87,78%)	120.357 m (90.41%)	123.898, 51 m (93.04%)	127.359 m (95.67%)	127.359 m (95.67%)
			Kegiatan:									



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcam) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target					Kondisi Akhir 2021
							2017	2018	2019	2020	2021	
							Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	
			1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Dokmen Perencanaan DI (Master plan, database, dokumen ded saluran skunder, tersier, kwarer, FS, UKL UPL, amdal dan dokumen perencanaan lainnya)	Dok		50	60	70	80	90	90
			2 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang saluran yang di rehab (Total panjang saluran: 133.124)	M	15.2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	47.9
			3 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DI)	DI	58	8	7	10	20	15	58
			4 Pemberdayaan petani pemakai air	Kelompok GP3A yang dibina	KLP	6	4	8	10	10	7	45
			5 Kegiatan Komisi Irigasi	Perbup Pola Tanam	Dok	1	1	1	1	1	1	6
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pembangunan		Persentase Ketersediaan infrastruktur Pelayanan Dasar			%	73	74	76	77	80	82	82
	Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik	persentase jalan dalam kondisi baik			%	72,47% (535,85Km)	68.24% (552,695Km)	70.62 (571,925Km)	71.85% (581.925Km)	74,32 (591,925Km)	75,79 (613,807 km)	75,79 (613,807 km)



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator kinerja Program (Outcam) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target					Kondisi Akhir 2021
								2017	2018	2019	2020	2021	
								Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	
	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	Persentase Rumah tangga yang terlayani air bersih				%	-	75	76	78	80	82	82
	Ketaatan terhadap RTRW	Persentase Ketaatan terhadap RTRW				%	77.32	78.47	80.32	82.54	84.36	86.71	86.71
			II	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang dibangun terhadap rencana induk pengembangan jalan (Panjang jalan kabupaten : 809,879KM)	%	72,47% (535,85Km)	68.24% (552,695Km)	70.62% (571,925Km)	71.85% (581.925Km)	74,323% (601,925Km)	75,79% (613,807 km)	75,79% (613,807 km)
				Kegiatan:									
			1	Perencanaan pembangunan jalan	Dokumen Perencanaan jalan (DED)	Dok		14	4	7	5	5	38
			2	Perencanaan pembangunan jembatan	Dokumen Perencanaan jembatan (DED)	Dok		4	3	0	1	2	10
			3	Pembangunan jalan	Jalan kabupaten tidak mantap menjadi jalan mantap	KM		16.85	19.23	10.00	10.00	10.00	124.64
			4	Pembangunan Jembatan	jembatan kabupaten yang dibangun	Unit		0	1	1	2	3	7
					Jembatan desa yang dibangun	Unit			1				1



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator kinerja Program (Outcam) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target					Kondisi Akhir 2021
								2017	2018	2019	2020	2021	
								Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	
			5	Penyusunan sitem informasi/data base jalan dan Jembatan	Database jalan Kabupaten	Dok		1	1	1	1	1	6.00
			6	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	database jembatan Kabupaten	Dok		1	1	1	1	1	6.00
		Persentase jalan yang kondisinya baik (mantap)	III	2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan		%	72,47 (535,85Km)	68.24% (552,695Km)	70.62 (571,925Km)	71.85% (581.925Km)	74,323% (601,925Km)	75,79 (613,807 km)	74,323% (601,925Km)
				Kegiatan:									
			1	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah DED pemeliharaan jalan	Dok		2	2	2	2	2	10.00
			2	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah DED pemeliharaan Jembatan	Dok				1	1	1	3.00
			3	Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan	Jalan Kabupaten yang di Rehab	KM		263.63	269.23	482.65	552.00	571.00	2446.79
			4	Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan	Jalan yang di Rehab	Ruas		8	1	2	2	2	15.00
			5	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	jembatan yang di rehab	Unit							
			6	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Operasional dan pemeliharaan kendaraan dan alat berat	Unit	0	0	3	3	3	3	12.00



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan		Indikator kinerja Program (Outcam) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target					Kondisi Akhir 2021
								2017	2018	2019	2020	2021	
								Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	
					Alat berat	Unit			0	0	0	1	1.00
			IV	Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pemenuhan Ketersediaan Dokumen RDTL	%	8.33	20.83	52	60	65	70	70
				Kegiatan:									
			1	Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Ruang	Dokumen rencana detail tata ruang kawasan	Dok		0	1	1	0	1	3.00
					Penyusunan perda tata ruang	Dok		0	0	1	0	1	2.00
			2	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Database rekomendasi dan informasi ruang	Rekom		325	401	420	450	470	2066.00
			3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian, Pemanfaatan Ruang	Database identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Dok			1	1	1	1	4.00
					Sosailisasi penataan ruang ke masyarakat	Kali				8	9	10	27.00



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcam) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target					Kondisi Akhir 2021
							2017	2018	2019	2020	2021	
							Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	
		Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	V	Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	%		74.5	76	78	80	82	82
				Kegiatan:								
			1	Perencanaan Pengembangan Keciaptakaryaan	Dok		3	11	4	4	4	26
				Database jaringan air bersih	Dok			1	1	1	1	4
			2	Penyediaan Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat	%		71.44	73.31	75	85	88	88
			4	Kegiatan pengelolaan teknis proyek (PTP)	Orang							
Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai Sakip Dinas PUPR			Nilai	C	C	C	B	B	B	B
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan	Nilai LKJIP SKPD			Nilai							
		Persentase layanan administrasi perkantoran	VI	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	90	90	90	90	90	90	90
				Kegiatan:								



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcam) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target					Kondisi Akhir 2021
							2017	2018	2019	2020	2021	
							Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	
			1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	%		100	100	100	100	100	100
				Jasa air	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
				Jasa Listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
				Jasa Internet	Bulan	12	12	12	12	12	12	12
			2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	%	100	100	100	100	100	100	100
				STNK Roda 4	Unit	17	17	17	17	17	17	17
				STNK Roda 2	Unit	60	60	60	60	60	60	60
			3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	90	90	90	90	90	90	90
				Meubeler	Unit	58	5	8	10	10	10	101
				Komputer/Laptop/Server dan perlengkapannya	Unit	24	10	5	16	6	6	67
				Alat-alat rumah tangga	Unit							
				Alat-alat elektronik lainnya	Unit		1	5	1	2	2	11



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcam) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target					Kondisi Akhir 2021
							2017	2018	2019	2020	2021	
							Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	
			3	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung kantor layak pakai	Unit		1	1	1	1	1
		Gedung pemerintahan yang sesuai standar	VIII	Program Penyediaan Sarana Prasaran Gedung Kantor		Unit			2	2	2	
				Kegiatan:								
			1	Pembangunan Gedung Kantor		Unit		1	2	2	2	7
			2	Pembangunan Gedung Kantor DPRD		Unit		1				1
		Persentase pelaporan kinerja dan keuangan OPD tepat waktu	IX	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		%	100	100	100	100	100	100
				Kegiatan:								
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reasliasi kinerja SKPD		%	100	100	100	100	100	100
					Dokumen Perencanaan	Dok	1	1	1	1	1	5
					Renstra	Dok	1	1				1



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcam) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target					Kondisi Akhir 2021
							2017	2018	2019	2020	2021	
							Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	
				Renja	Dok	1	1	1	1	1	1	5
				RKA	Dok	1	1	1	1	1	1	5
				Laporan capaian kinerja bulanan	Dok	12	12	12	12	12	12	60
				LKJIP	Dok	1	1	1	1	1	1	5
				LKPJ	Dok	1	1	1	1	1	1	5
				LPPD	Dok	1	1	1	1	1	1	5



Matrix Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021

Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran/ Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target										Kondisi Akhir 2021
				2017		2018		2019		2020		2021		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Cakupan layanan irigasi	Ha	13.123,35	13.123,35		13.123,35		13.123,35		13.123,35		13.123,35		13.123,35
	Debit air	L/s	23.108			23.108		23.108		23.108		23.108		23.108
I	Program Pengembangan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya	Ha	50.529,81 (semua Kewenangan) 13.125,35 (Kewenang an Kabupaten)	49.517 (semua Kewenanga n) 13.123,35 (Kewenang an Kabupaten)	21,477,195,786.00	49.517 (semua Kewenanga n) 13.123,35 (Kewenang an Kabupaten)	13,702,500,236.00	49.517 (semua Kewenanga n) 13.123,35 (Kewenang an Kabupaten)	23,782,210,000.00	49.517 (semua Kewenanga n) 13.123,35 (Kewenang an Kabupaten)	24,020,033,000.00	49.517 (semua Kewenanga n) 13.123,35 (Kewenang an Kabupaten)	24,260,234,000.00	49.517 (semua Kewenanga n) 13.123,35 (Kewenang an Kabupaten)
	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik (Total panjang saluran: 133.124)	%	109.851 m (82,52%)	113.351 m (85,15%)		116.851 m (87,78%)		120.357 m (90.41%)		123.898, 51 m (93.04%)		127.359 m (95.67%)		127.359 m (95.67%)
Kegiatan:														
1	Perencanaan pembangunan jaringan iriggasi	Dok		50	547,205,410.00	60	758,258,500.00	70	343,725,000.00	80	347,163,150.00	90	352,979,300.00	90
2	Rehabilitasi/pemelihaan jaringan irigasi	M	15,200	3,500	18,763,857,686.00	3,500	11,277,000,000.00	3,500	18,444,435,000.00	3,500	18,628,879,350.00	3,500	18,813,323,700.00	47,900



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran/Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target										Kondisi Akhir 2021	
				2017		2018		2019		2020		2021			
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan		
3	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Operasional Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DI)	DI	58	8	1,342,083,260.00	7	1,248,458,020.00	10	1,195,000,000.00	20	1,206,950,000.00	15	1,218,900,000.00	58
4	Pemberdayaan petani pemakai air	Kelompok GP3A yang dibina	KLP	6	4	824,049,430.00	8	418,783,716.00	10	3,744,678,000.00	10	3,782,124,780.00	7	3,819,571,560.00	45
5	Kegiatan Komisi Irigasi	Perbup Pola Tanam	Dok	1	1		1		1	54,372,000.00	1	54,915,720.00	1	55,459,440.00	6
	Ketersediaan infrastruktur	%	73	74		76		77		80		82		82	
	persentase jalan dalam kondisi baik	%	72.47% (535,85Km)	68.24% (552,695Km m)		70.62 (571,925Km m)		71.85% (581.925Km m)		74.32 (591,925Km m)		75.79 (613,807 km)		75.79 (613,807 km)	
	Rumah tangga yang terlayani air bersih	%	-	75		76		78		80		82		82	
	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	77.32	78.47		80.32		82.54		84.36		86.71		86.71	
II	Program pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang dibangun terhadap rencana induk pengembangan jalan (Panjang jalan kabupaten : 809,879KM)	%	72.47% (535,85Km)	68.24% (552,695Km m)	169,554,485,266.00	70.62 (571,925Km m)	86,742,469,897.00	71.85% (581.925Km m)	69,468,521,150.00	74,323% (601.925Km m)	70,163,207,000.00	75.79 (613,807 km)	70,864,840,000.00	75.79 (613,807 km)
	Kegiatan:					0.7062									
1	Perencanaan pembangunan jalan	Dokumen Perencanaan jalan (DED)	Dok		14	1,024,744,550.00	4	426,210,000.00	7	516,192,000.00	5	567,811,200.00	5	624,592,320.00	38
2	Perencanaan pembangunan jembatan	Dokumen Perencanaan jembatan (DED)	Dok		4		3	176,408,400.00	0	390,867,750.00	1	429,954,525.00	2	472,949,977.50	10
3	Pembangunan jalan	Jalan kabupaten tidak mantap menjadi jalan mantap	KM		16.85	168,450,788,866.00	19.23	84,751,796,433.00	10.00	66,027,474,950.00	10.00	66,378,056,180.00	10.00	66,701,174,098.00	124.64



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran/Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target										Kondisi Akhir 2021
				2017		2018		2019		2020		2021		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
4	Pembangunan Jembatan	jembatan kabupaten yang dibangun	Unit	0		1	1,299,175,564.00	1	2,216,436,450.00	2	2,438,080,095.00	3	2,681,888,104.50	7
	Jembatan desa yang dibangun	Unit			1					-		-	1	
5	Penyusunan sitem informasi/data base jalan dan Jembatan	Database jalan Kabupaten	Dok	1	78,951,850.00	1	88,879,500.00	1	317,550,000.00	1	349,305,000.00	1	384,235,500.00	6.00
6	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	database jembatan Kabupaten	Dok	1		1		1		1	-	1	-	6.00
III	2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang kondisinya baik (mantap)	%	72.47 (535,85Km)	68.24% (552,695Km m)	70.62 (571,925Km m)	5,129,399,050.00	71.85% (581.925Km m)	8,892,223,050.00	74,323% (601.925Km m)	8,981,146,000.00	75,79 (613,807 km)	9,090,958,000.00	74,323% (601.925Km m)
Kegiatan:														
1	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah DED pemeliharaan jalan	Dok	2	89,130,950.00	2	100,025,000.00	2	147,263,300.00	2	161,989,630.00	2	176,715,960.00	10.00
2	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah DED pemeliharaan Jembatan	Dok				-	1	99,965,500.00	1	109,962,050.00	1	119,958,600.00	3.00
3	Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jalan	Jalan Kabupaten yang di Rehab	KM	263.63	3,328,501,660.00	269.23	3,794,229,500.00	482.65	5,559,014,000.00	552.00	5,399,078,745.00	571.00	5,259,938,540.00	2446.79
4	Rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan	Jalan yang di Rehab	Ruas	8	2,196,629,100.00	1	441,672,000.00	2	782,650,500.00	2	860,915,550.00	2	939,180,600.00	15.00
5	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	jembatan yang di rehab	Unit						1,364,852,750.00		1,501,338,025.00		1,637,823,300.00	



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran/Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target										Kondisi Akhir 2021
				2017		2018		2019		2020		2021		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
6 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	Operasional dan pemeliharaan kendaraan dan alat berat	Unit	0	0	1,055,053,343.00	3	793,472,550.00	3	938,477,000.00	3	947,862,000.00	3	957,341,000.00	12.00
	Alat berat	Unit				0		0		0		1		1.00
IV Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pemenuhan Ketersediaan Dokumen RDTL	%	8,33	20,83	594,828,620.00	52	909,339,320.00	60	1,022,780,000.00	65	1,033,008,000.00	70	1,043,339,000.00	70
Kegiatan:														
1 Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Ruang	Dokumen rencana detail tata ruang kawasan	Dok		0	252,028,433.00	1	548,056,499.00	1	697,385,625.00	0	675,074,187.50	1	652,865,750.00	3.00
	Penyusunan perda tata ruang	Dok		0		0		1		0	-	1	-	2.00
2 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Database rekomendasi dan informasi ruang	Rekom		325	172,210,345.00	401	199,813,314.00	420	165,094,375.00	450	181,603,812.50	470	198,113,250.00	2066.00
3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian, Pemanfaatan Ruang	Database identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Dok			170,589,842.00	1	161,469,507.00	1	160,300,000.00	1	176,330,000.00	1	192,360,000.00	4.00
	Sosailisasi penataan ruang ke masyarakat	Kali						8		9	-	10	-	27.00
V Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	%		74.5	8,989,080,714.00	76	15,993,691,639.00	78	22,012,168,250.00	80	22,232,290,000.00	82	22,454,613,000.00	82
Kegiatan:														



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran/ Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target										Kondisi Akhir 2021
				2017		2018		2019		2020		2021		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
1 Perencanaan Pengembangan Keciptakaryaan	DED air bersih	Dok		3	623,882,300.00	11	692,764,201.00	4	547,000,000.00	4	601,700,000.00	4	661,870,000.00	26
	Database jaringan air bersih	Dok				1		1		1	-	1	-	4
2 Penyediaan Sarana Air Bersih Bagi Masyarakat	Masyarakat terlayani dan mengkonsumsi air bersih	%		71,44	8,365,198,414.00	73,31	15,300,927,438.00	75	21,465,168,250.00	85	21,630,590,000.00	88	21,792,743,000.00	88
4 Kegiatan pengelolaan teknis proyek (PTP)	Tenaga teknis PTP terlatih	Orang											-	
	Nilai Sakip Pemda	Nilai												
	Nilai LKJIP SKPD	Nilai												
VI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	%			960,279,651.00		921,098,928.00		1,048,384,150.00		1,382,819,550.00		1,410,615,000.00	
Kegiatan:														
1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					104,245,731.00		99,297,588.00		109,227,346.80		120,150,081.48		132,165,089.63	
	Jasa air	bln	12	12		12		12		12		12		12
	Jasa Listrik	bln	12	12		12		12		12		12		12



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran/Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target										Kondisi Akhir 2021
				2017		2018		2019		2020		2021		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Jasa Internet	bln		12		12		12		12		12		12
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional													
	STNK Roda 4	Unit		17		17		17		17		17		17
	STNK Roda 2	Unit		60		60		60		60		60		60
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				315,455,000.00		74,115,000.00		81,526,500.00		89,679,150.00		98,647,065.00	
	Meubeler	Unit	58	5		8		10		10		10		101
	Komputer/Laptop/Server dan perlengkapannya	Unit	24	10		5		16		6		6		67
	Alat-alat rumah tangga	Unit												
	Alat-alat elektronik lainnya	Unit		1		5		1		2		2		11
3	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali			141,793,920.00		79,509,340.00		87,460,274.00		96,206,301.40		105,826,931.54	
	Penyediaan makan dan minum	kali												
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan				398,785,000.00		439,260,000.00		518,361,329.20		799,794,447.12		769,287,386.83	



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran/Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target										Kondisi Akhir 2021
				2017		2018		2019		2020		2021		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
	Laporan Bulanan Keuangan SKPD	Dok	12	12		12		12		12		12		12
	Laporan Tahunan Keuangan SKPD	Dok	1	1		1		1		1		1		1
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	bln	12	12		12		12		12		12		12
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	bln					228,917,000.00		251,808,700.00		276,989,570.00		304,688,527.00	
VII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%					265,231,914.00		978,474,000.00		988,259,000.00		998,142,000.00	
Kegiatan:														
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Unit							390,000,000.00		429,000,000.00		434,000,000.00	
2	Pemeliharaan rutin/bekrala kendaraan dinas/operasional	Unit			190,707,300.00		189,655,914.00		304,198,000.00		294,617,800.00		296,617,800.00	
3	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Unit			63,650,000.00		75,576,000.00		284,276,000.00		264,641,200.00		267,524,200.00	
VII I	Program Penyediaan Sarana Prasaran Gedung Kantor	Unit			57,576,093,270.00		117,146,206,262.00	1	154,005,580,000.00		80,000,000,000.00		80,800,000,000.00	
Kegiatan:														
1	Pembangunan Gedung Kantor	Unit					117,146,206,262.00		154,005,580,000.00		80,000,000,000.00		80,800,000,000.00	



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran/ Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir 2016	Target										Kondisi Akhir 2021
				2017		2018		2019		2020		2021		
				Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	
2 Pembangunan Gedung Kantor DPRD		Unit			57,576,093,270.00									
IX Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan kinerja dan keuangan OPD tepat waktu	%		100	248,305,280.00	100	285,286,450.00	100	263,310,000.00	100	265,944,000.00	100	268,604,000.00	100
Kegiatan:														
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar reasliasi kinerja SKPD				100	248,305,280.00	100	285,286,450.00	100	263,310,000.00	100	265,944,000.00	100	268,604,000.00	100
	Dokumen Perencanaan	Dok	1	1		1		1		1		1		1
	Renstra	Dok	1	1										1
	Renja	Dok	1	1		1		1		1		1		1
	RKA	Dok	1	1		1		1		1		1		1
	Laporan capaiankinerjabulana	Dok	12	12		12		12		12		12		12
	LKJIP	Dok	1	1		1		1		1		1		1
	LKPJ	Dok	1	1		1		1		1		1		1
	LPPD	Dok	1	1		1		1		1		1		1



Matrix Target Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kewenangan Kabupaten pertahun

NO	PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL			TARGET TAHUNAN (%)					SKPD PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	SATUAN	2019 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	
I	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	%	100%	40 %	60 %	75 %	90 %	100 %	Dinas Dinas PUPR
			Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada.	%	70%	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	
II	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten/Kota Baik dan Sedang.	%	60%	20%	30%	40%	50%	60 %	Dinas Dinas PUPR
		Tersedianya konektifitas wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota	%	100%	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	
III	Penyediaan air minum	Meningkatnya kualitas air minum permukiman perkotaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	% Penduduk	81.77%	16.35%	32.71 %	49.06 %	65.42%	81.77%	Dinas Dinas PUPR
IV	Penataan bangunan dan	Meningkatnya tertib pembangunan	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	IMB	60%	20%	30%	40%	50%	60%	BPMP2T



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL			TARGET TAHUNAN (%)					SKPD PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	SATUAN	2019 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	
	lingkungan	bangunan gedung	yang diterbitkan								
V	Penanganan permukiman kumuh perkotaan	Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	HA	10%	2%	4%	6%	8%	10%	Dinas Perkim
VI	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIJAKI)	%	60%	20%	30%	40%	50%	60%	BPMP2T
VII	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPMP2T
VIII	Informasi penataan ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BAPEDA
IX	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya ketersediaan RTH	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan	%	50%	10%	20%	30%	40%	50%	Dinas Perkim



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PELAYANAN DASAR		STANDAR PELAYANAN MINIMAL			TARGET TAHUNAN (%)					SKPD PENANGGUNG JAWAB
			INDIKATOR	SATUAN	2019 (%)	2015	2016	2017	2018	2019	
	Publik										

3. Strategi Dan Kebijakan

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya adalah arah atau tindakan yang diambil dan ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rangkaian langkah terpadu untuk mewujudkan misi, tujuan dan sasaran pembangunan dengan mencermati isu strategis pembangunan Kabupaten Lombok Tengah lima tahun kedepan, maka strategi, arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 yang menjadi urusan dan wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang . Berdasarkan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan yang dihadapi di Kabupaten Lombok Tengah, dirumuskan kebijakan umum pembangunan daerah kabupaten lombok tengah tahun 2017-2020 yang diprioritaskan pada 5 (lima) prioritas pembangunan yakni:

1. Penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal
2. Peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial
3. Penguatan struktur ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam
4. Peningkatan kualitas infrastruktur
5. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik

Adapun sinergi antara kelima skala prioritas tersebut dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan akan dituangkan dalam program dan kegiatan pembangunan secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Dari Kelima Misi Daerah Kabupaten Lombok tengah, maka Misi keEmpat adalah misi yang harus diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dan misi tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.



Sebagai Satuan Kerja pekrangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur ke-PUan dengan memperhatikan lima prioritas pembangunan dan misi keempat yang menuangkan sasaran dan kebijakan sebagai mana tercantum dibawah ini:

MISI	TUJUAN	SASARAN
1	2	3
MISI KETIGA: Mendorong kemajuan ekonomi daerah dan kemakmuran masyarakat melalui perkuatan struktur ekonomi dengan dukungan stabilitas kamtibmas	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Meningkatnya produktivitas dan daya saing sektor agraris serta ketahanan pangan
MISI KEEMPAT: Menjaga Keselarasan, Keserasian dan Keterpaduan Pembangunan Kawasan dan Antar Kawasan dengan Dukungan Infrastruktur yang Memadai	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan dan Keterpaduan Kawasan dan Antar Kawasan	Meningkatnya Infrastruktur dalam mendukung Koneksitas wilayah Terwujudnya tata ruang dan lingkungan hidup yang berkualitas Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukiman
MISI KELIMA: Mewujudkan pemerintahan yang baik dan kepastian hukum dengan dukungan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah



Hal tersebut diatas menjadi acuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melakukan penetapan indikator sasaran kinerja SKPD yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Dengan acuan indikator RPJMD dan program Prioritas pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017-2021, dapat diklasifikasikan dari beberapa aspek yakni:

1. Aspek Masyarakat, terdiri dari:
 - Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
 - Fokus Kesejahteraan Sosial
2. Aspek Pelayanan Umum, terdiri dari:
 - Fokus Pelayanan Urusan Wajib
 - Fokus Pelayanan Urusan Pilihan
3. Aspek Daya Saing Daerah, yang menjelaskan kemampuan ekonomi daerah
 - Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.
 - Fokus Iklim Investasi
 - Fokus Sumber Daya Manusia

Beberapa Unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang bersifat strategis yang diperlukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan atau tugas SKPD yaitu perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan, serta penelitian dan pengembangan.

a. Perencanaan

Permasalahan utama perencanaan adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat belum optimal yang disebabkan oleh masih terbatasnya kapasitas aparatur perencanaan, belum optimalnya pengelolaan data, belum efektifnya monitoring dan evaluasi, dan masih kurang terpadunya antar dokumen perencanaan, dan belum sinerginya perencanaan lintas sektor dalam pembangunan.



b. Pengawasan

Masih kurangnya intensitas pengawasan disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana, kapasitas aparatur pengawasan yang masih terbatas baik secara kualitas maupun kuantitas.

c. Kepegawaian

Belum optimalnya pendayagunaan aparatur disebabkan oleh penyediaan sarana prasarana kepegawaian yang belum memadai dan masih kurangnya kapasitas dan kompetensi aparatur kepegawaian. Rasio jumlah pegawai tidak sesuai dengan beban kerja yang ada pada setiap satuan anggaran.

d. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang belum maksimal disebabkan oleh kapasitas SDM, kelembagaan dan sistem yang belum memadai.

e. Pendidikan dan Latihan

Pengembangan sumber daya aparatur belum optimal disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, anggaran pembiayaan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur.

f. Penelitian dan Pengembangan

Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah belum optimal disebabkan oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung.



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang **VISI:**“Terwujudnya sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan dan mampu melayani kebutuhan masyarakat”

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
Mempertahankan, meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) secara optimal serta mengembangkan fungsi sarana prasarana Sumber Daya Air (SDA) yang berkelanjutan dan berdayaguna	Meningkatkan sistem jaringan irigasi yang handal	Meningkatnya cakupan layanan jaringan irigasi	Pembangunan dan rehabilitasi sarpasinfrastruktur irigasi serta meningkatkan operasional rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan meningkatkan kinerja OP.	Program Pengembangan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya	- Cakupan layanan irigasi - Persentase panjang saluran dalam kondisi baik
	Meningkatkan ketahanan air untuk berbagai kebutuhan	Meningkatnya ketersediaan air baku	Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku	Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan sumber daya air	Program pengembangan pengelolaan air minum	Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih
Mempertahankan dan meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan, kawasan agrowisata dan kawasan PKW serta mendukung system transportasi darat yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan system jaringan infrastruktur jalan dan jembatan kearah standar Pelayanan minimum yang sesuai dengan perkiraan lalu lintasnya - Memberikan pelayanan jasa konstruksi dan pengujian laboratorium kualitas mutu lingkungan dan mutu konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan penyelenggaraan jalan dan jembatan Kabupaten dalam kondisi mantap - Meningkatnya pencapaian perolehan jasa konstruksi dan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap - Pemberian pelayanan jasa konstruksi dan pengujian labotrartorium kualitas mutu ling-kungan dan mutu konstruksi yang memenuhi standar 	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun - Meningkatkan kualitas pelayanan jasa Kostruksi dan pengujian labotrartorium kualitas mutu ling-kungan dan mutu konstruksiyang memenuhi standar. 	Program rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan	Mempertahankan jaringan jalan dan jembatan kondisi mantap
					Program Pembangunan jalan dan jembatan	Persentase jalan yang dibangun terhadap rencana induk pengembangan jalan
					Program Pengadaan tanah untuk infrastruktur	Cakupan penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis baru.



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
					Program perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pemenuhan ketersediaan dokumen RDTL
Mengembangkan Pendayagunaan pelayanan informasi dan jasa, pengujian, konstruksi dan lingkungan	Melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan Informasi teknologi pembangunan bidang kePUan	Meningkatnya arus informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang kePUan	Pemberian pelayanan informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang kePUan yang berkualitas.	Meningkatkan cakupan pelayanan informasi dan rujukan teknis teknologi pembangunan bidang kePUan	Program Pengkajian dan Pene-rapanTeknologi Bidang Pekerjaan Umum	Prosentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (<i>centre of excellence</i>) bidang pekerjaan umum
Mendorong SDM yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance.	Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik	Meningkatkan upaya pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi SKPD
	Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan arana aparatur	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan upaya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi SKPD
					Program penyediaan sarana prasaran gedung kantor	Gedung pemerintah yang sesuai standard
	Melaksanakan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya hasil pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Pelaporan hasil capaian kinerja dan keuangan yang lebih baik.	Meningkatkan upaya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
					dan keuangan	mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi SKPD

BAB V

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DAN SPM

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah kedepan baik pengaruh dari luar (*external*) maupun dari dalam (*internal*) Dinas Dinas PUPR itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016 - 2020.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Yang berkaitan dengan RPJMD adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Kinerja	Kondisi Awal 2017	Kondisi Akhir 2021	Strategi	Kebijakan	Program
Terwujudnya layanan irigasi yang optimal	Rasio ketersediaan debit air irigasi	Cakupan/Luas layanan daerah irigasi(ha) wewenang kabupaten	49.517 13.123,35	49.517 13.123,35	Pembangunan dan rehabilitasi sarpasinfrastruktur irigasi serta meningkatkan operasional rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi	Melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan meningkatkan kinerja OP.	Program Pengembangan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya
		Debit air	23.108	23.108			
					Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku	Melaksanakan penambahan penyediaan air baku melalui pendayagunaan sumber daya air	
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dalam mendukung pembangunan	Meningkatnya persentase jalan dalam kondisi baik	Persentase jalan dalam kondisi baik	72,4%	75,79%	Pembangunan dan Peningkatan jalan dan jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun	Program Pembangunan jalan dan jembatan
							Program rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan Jembatan
.	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	67,5%	82%	Terpenuhinya kebutuhan akses air bersih yang memadai dan berkualitas	Tercapainya ketersediaan sarana prasarana air bersih	Program pengembangan pengelolaan air minum
	Ketaatan terhadap RTRW	Persentase ketaatan terhadap RTRW	77,32%	86,71%			Program perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Kinerja	Kondisi Awal 2017	Kondisi Akhir 2021	Strategi	Kebijakan	Program
Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pelayanan jasa administrasi perkantoran	100%	100%	Pelayanan administrasi perkantoran yang lebih baik	Meningkatkan upaya pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan administrasi perkantoran
Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan sarana aparatur	Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	80%	80%	Peningkatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan upaya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator Kinerja SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, Yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB
I	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.	%	100%	Dinas Dinas PUPR
			Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang sudah ada.	%	90%	
II	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan jalan Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten/Kota Baik dan Sedang.	%	71,85%	Dinas Dinas PUPR
		Tersedianya konektifitas wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah Kabupaten/Kota	%	100%	
III	Penyediaan air minum	Meningkatnya kualitas air minum permukiman perkotaan	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	% Penduduk	78%	Dinas Dinas PUPR
IV	Penyediaan Sanitasi	Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	% Penduduk	60%	Dinas Perkim dan Dinas LH
			Persentase pengurangan sampah di perkotaan	% Penduduk	20%	
			Persentase pengangkutan sampah	% Penduduk	70%	
			Persentase pengoprasian TPA	%	70%	
				Pengoperasian TPA		Dinas Perkim dan Dinas LH
			Persentase penduduk yang terlayani jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi	% Penduduk	50%	



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2019	SKPD YANG BERTANGGUNG JAWAB
			genangan (lebih dari 30cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun		50%	
V	Penataan bangunan dan lingkungan	Meningkatnya tertib pembangunan bangunan gedung	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	IMB	60%	BPMP2T
VI	Penanganan permukiman kumuh perkotaan	Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan	Persentase berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	HA	10%	Dinas Dinas PUPR
VII	Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi	Meningkatnya ketersediaan informasi jasa konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten/Kota pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	%	60%	BPMP2T
VIII	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Meningkatnya kualitas layanan perizinan usaha jasa konstruksi	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	%	100%	BPMP2T
IX	Informasi penataan ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	%	100%	Dinas Dinas PUPR/ BAPEDA
X	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Meningkatnya ketersediaan RTH	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan	%	50%	Dinas Dinas PUPR /BAPEDA



Penjelasan Indikator Kinerja Startegis yang mengacu pada indikator kinerja RPJMD

No	Indikator Sasaran Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)	Penjelasan Indikator
ASPEK PELAYANAN UMUM				
A. Fokus Layanan Urusan Wajib				
3 Pekerjaan Umum				
3.1	Persentase panjang jalan yang dibangun terhadap rencana induk pengembangan jalan	76,92%	82,52%	<ul style="list-style-type: none"> Target kemantapan jalan pada tahun 2021 yang ingin dicapai adalah 613,807 Km atau 75,79% dari panjang jalan kabupaten sepanjang 809.879 Km. Untuk mencapai angka tersebut setiap tahunnya (Tahun 2017 s/d 2021) akan dilaksanakan pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 10,00 Km, sedangkan untuk tahun 2018 jalan yang akan ditangani sepanjang 10 Km sedangkan perkiraan prosentase kemantapan jalan pada tahun tersebut adalah 70,6 karena beberapa ruas jalan pada awal tahun 2016 sudah tampak penurunan kondisinya. Yang perlu diperhatikan adalah untuk mencapai kondisi jalan mantap sesuai dengan target tersebut disyaratkan bahwa Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan tetap dilaksanakan untuk menjaga kestabilan kondisi jalan. Penurunan kondisi jalan jika tidak dilakukan pemeliharaan rutin adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini (Gambar A.1): <div data-bbox="920 820 1480 911" data-label="Figure"> </div> <p>Gambar A.1 - Hubungan Kondisi dan Akumulasi Beban Kendaraan</p> <p>Keterangan: Gambar A.1. Menunjukkan penurunan kondisi jalan sebagai akibat kerusakan pada permukaan jalan sebagai akibat dari kondisi lalu lintas dan non lalu lintas</p> <p>Garis A: Menunjukkan Penurunan kondisi yang mengakibatkan kemampuan jalan dalam mendukung beban sumbu kumulatif berkurang atau dengan kata lain umur rencana perkerasan jalan akan berkurang</p> <p>Garis B: Menunjukkan pengaruh jika dilakukannya pemeliharaan, yaitu akan memperlambat tingkat kerusakan jalan (titik 1), memperbaiki kondisi mendekati kondisi awal (titik 2 dan titik 3)</p> <p>Sumber: Teknik Pengelolaan Jalan – Departemen PU Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian Pengembangan Prasarana Transportasi (April 2005)</p>
3.2	% Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	72,4%	75,79%	
3.3	Cakupan/luas layanan Daerah	49.517 13.123,35	49.517 13.123.35	



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Sasaran Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)	Penjelasan Indikator
	irigasi (Ha) (wewenang Kabupaten) 13.123,35 Ha			sebanyak 24.495 ha
3.4	Persentase panjang saluran dalam kondisi baik	82,52	95,67	<ul style="list-style-type: none"> Panjang saluran induk Kabupaten 37.989 m dan saluran sekunder Kabupaten 95.135 m dengan total 133.124 m, yang berkondisi baik sepanjang 109.851 (82,52%) pada akhir tahun 2016. Capaian yang ditargetkan pada akhir RPJMD sepanjang 127.359 m (95.67%) yang berkondisi baik
3.5	Cakupan rumah tangga yang terlayani air bersih	67,5	82	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi kinerja awal tahun 2016 merupakan capaian kinerja akhir RPJMD 2015 sebesar 434 lt/dtk. Debit capaian tersebut bersumber antara lain dari: <ul style="list-style-type: none"> 5 sumber air PDAM, yaitu 4 mata air (MA. Aik Bone, Nyeredep, Benang Stokel, Tibu Nangklok I & II) serta Bendungan Batujai dengan total debit sebesar 366 lt/dtk. 68 lt/dtk lainnya bersumber dari mata air yang sebagian besar tersebar di wilayah utara serta sumur-sumur bor di wilayah selatan. Target Kinerja tahun 2016 sebesar 350 lt/dtk akan diperoleh melalui jaringan baru PDAM yang bersumber dari MA. Tibu Lempanas dan MA. Sesere (diperkirakan kedua jaringan tersebut belum berfungsi penuh sehingga total debit yang bisa disediakan hanya 300 lt/dtk dari rencana 450 lt/dtk) serta beberapa sumur bor dan mata air yang antara lain terdapat di Desa Mekar Bersatu, Desa Batujangkih, Desa MontongAjan, Desa Selong Belanak, Desa Sengkerang, Desa Bilelendo dan beberapa lokasi lain yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah dengan total debit 50 lt/dtk. Direncanakan selanjutnya untuk debit tahun 2017 – 2020 sebesar 230 lt/dtk, kapasitas penyediaan sumber air bersih akan ditambah melalui penyempurnaan dua jaringan MA. Tibu Lempanas dan MA. Sesere PDAM (100 lt/dtk) serta pemanfaatan beberapa mata air potensial di wilayah utara Kabupaten Lombok Tengah seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Lombok Tengah serta sumur-sumur bor di wilayah selatan dengan total debit 130 lt/dtk . Pada kondisi akhir kinerja RPJMD 2020, ditetapkan jumlah ketersediaan air bersih sampai dengan tahun 2020 sebesar 1.014 lt/dtk. Secara garis besar, target penyediaan air bersih oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah akan diperoleh melalui sistem perpipaan yang bersumber dari jaringan PDAM (tapping pipa), mata air potensial serta sumur bor yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
3.6	Pemenuhan ketersediaan dokumen RDTR	20,83%	33,33%	<ul style="list-style-type: none"> Pada kurun waktu RPJMD 2016-2020 target kinerja yang ingin dicapai sebanyak 12 dokumen, realisasi capaian pada tahun 2016 sebanyak 1 dokumen (RDTR Mujur) sehingga persentase yang diperoleh sebesar $(1/12) \times 100\%$ atau sebesar 8,33%



Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Sasaran Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2017)	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2021)	Penjelasan Indikator
				<ul style="list-style-type: none"> 3 dokumen target RPJMD 2016-2021 yang tersisa ditargetkan: Tahun 2018 : 1 dokumen $((1/3) \times 100\% = 33,33\%)$ Tahun 2019 : 1 dokumen $((1/3) \times 100\% = 33,33\%)$ Tahun 2021 : 1 dokumen $((1/3) \times 100\% = 33,33\%)$ Pada tahun 2018 sudah terpenuhi sebanyak 1 dokumen yaitu RTDR Kawasan Perkotaan Sengkol, Pada tahun 2019 target 1 dokumen yang ingin dicapai direncanakan akan menyusun updating RDTR Kawasan Perkotaan Praya yang sebelumnya pernah disusun bertahap dan belum mencakup semua wilayah perkotaan Praya. Diharapkan pada tahun ini, RDTR yang tersusun dahulu dapat digabungkan menjadi satu kesatuan RDTR Kawasan Perkotaan

BAB VI

PENUTUP

Dokumen renstra yang terusun ini merupakan pedoman yang akan dipakai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah selama lima tahun ke depan (2016- 2021). Kepala Dinas PUPR merupakan penanggung jawa utama dan harus didukung oleh seluruh komponen pegawai yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra tersebut akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur ke depan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan permukiman dapat berjalan secara efisien dan ramah lingkungan.

Dokumen ini sifatnya merupakan dokumen strategis dan global yang masih perlu dijabarkan ke dalam dokumen-dokumen perencanaan yang lebih spesifik. Renstra ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana kerja tahunan yang kemudian diurai ke dalam dokumen rencana kerja anggaran (RKA) sebagai dasar pengusulan anggaran.

Keberhasilan Renstra Dinas Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah ini sangat dipengaruhi oleh kesungguhan dari semu pihak yang terkait terutama pegawai Dinas PU di samping juga dipengaruhi oleh factor eksternal berupa lingkungan dan regulasi yang berlaku. Renstra Dinas Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah tahun 2016-2021 ini berlaku sejak ditetapkan oleh Kepala Dinas Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah yang sebelumnya disahkan oleh Bupati Lombok Tengah. Renstra ini berlaku tahun 2016 sampai dengan 2021 dan akan tetap digunakan/berlaku sampai ditetapkannya renstra yang baru.